



LKIP

KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
INSPEKTORAT
JALAN MAJAPAHIT NO.1

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Biak, 08 April 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN BIAK NUMFOR



FERDINAND P. ABENDONDIFU, SE
PEMBINA Tk.I

INSPEKTUR P. 0690124 199202 1 002



SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum.
Pj. Bupati Biak Numfor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta penjelasan tentang capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government & good government*.

Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2024 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPD sebagai tolak ukur analisis capaian kinerja dimaksud.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Disadari bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ke depan, namun dengan keyakinan dinamis, inspiratif, inovatif serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa yang akan datang.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Biak, 19 Februari 2025



BUPATI BIAK NUMFOR

Sofia Bonsapia
SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja, dalam RPD telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu 3 tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan “Tinggi”.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat terwujud, berkat dukungan semua elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1
C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	3
D. PERANGKAT DAERAH	5
E. SUMBER DAYA APARATUR	8
F. SUMBER DAYA KEUANGAN	10
G. ISU-ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. PERENCANAAN KINERJA KAB. BIAK NUMFOR TA. 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. PENGUKURAN KINERJA	26
B. REALISASI ANGGARAN	189
C. ANALISIS EFISIENSI	189
BAB IV PENUTUP.....	192
LAMPIRAN	

1.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	4
1.2	Jumlah ASN Kab. Biak Numfor Berdasarkan Jenis Kelamin	8
1.3	Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Golongan.....	9
1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Tadminitrasi Dan Fungsional.....	10
1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan.....	11
1.6	Jabatan Struktural ASN Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024	11
1.7	APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024	11
2.1	Tujuan Dan Sasaran RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.....	21
2.2	Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2024	23
3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	26
3.2	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	27
3.3	Rincian Penilaian Evaluasi Periode Tahun 2019 Dan 2021	28
3.4	Realisasi Kinerja Dan Target Rpd Kab. Biak Numfor	30
3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 Dan 2023	33
3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Rpd	38
3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 2	39
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 2 Tahun 2024..... dan 2023	44
3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target RP	49
3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024..... dan 2023	51
3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target RPD	54
3.12	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024 dan 2023.....	55
3.13	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target RPD.....	58
3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 5 Tahun 2024	60
3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 5 Tahun 2024	62
3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPD	64

3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024	
dan 2023	66
3.18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPD.....	70
3.19 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 7 Tahun 2024 dan 2023 ..	72
3.20 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 7 Tahun 2024	
dan 2023	74
3.21 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 7 Tahun 2024.....	
dan 2023	78
3.22 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Target RPD.....	82
3.23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 8 Tahun 2024.....	
dan 2023	83
3.24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 8 Tahun 2024	
dan 2023	88
3.25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 8 Tahun 2024	
dan 2023	94
3.26 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4 Sasaran 8 Tahun 2024 dan 2023.....	96
3.27 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target RPD...	100
3.28 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap	
Target RPD	101
3.29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2024.....	
dan 2023	102
3.30 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap	
Target RPD	105
3.31 Rata-Rata Lama Tinggal Berdasarkan Klasifikasi Hotel.....	106
3.32 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Tahun 2024 dan 2023.....	107
3.33 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Target RPD	111
3.34 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Tahun 2024 dan 2023.....	113
3.35 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Target RPD	115
3.36 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 13 Tahun 2024 dan 2023	117
3.37 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 13 Tahun 2024 dan 2023	121
3.38 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 13 Tahun 2024 dan 2023	125
3.39 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4 Sasaran 13 Tahun 2024 dan 2023	126
3.40 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Target RPD	131
3.41 Panjang jalan status mantap, rusak sedang, dan rusak berat s/d tahun 2024.....	133
3.42 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Tahun 2024 dan 2023.....	134

3.43	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Target RPD	140
3.44	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Tahun 2024 dan 2023.....	142
3.45	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Target RPD	145
3.46	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Tahun 2024 dan 2023.....	142
3.47	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Target RPD	150
3.48	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Tahun 2024 dan 2023.....	151
3.49	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Target RPD	152
3.50	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2024 dan 2023.....	154
3.51	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Target RPD	157
3.52	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 19 Tahun 2024 dan 2023	159
3.53	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024	163
3.54	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 19 Tahun 2024 dan 2023	163
3.55	Tindak Lanjut Rekomendasi LHE KEMENPANRB Tahun 2023	166
3.56	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 19 Tahun 2024 dan 2023	173
3.57	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4 Sasaran 19 Tahun 2024 dan 2023	176
3.58	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 5 Sasaran 19 Tahun 2024 dan 2023	180
3.59	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Target RPD	185
3.60	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Tahun 2024 dan 2023.....	187
3.61	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Target RPD	189





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan tema pembangunan dan program prioritas Tahun 2024, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor dijabarkan dalam 2 (dua) urusan sebagai berikut:

- 1) Urusan Wajib, yaitu :
 - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :
 - ✓ Pendidikan;
 - ✓ Kesehatan;
 - ✓ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - ✓ Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

- ✓ Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas;
 - ✓ Sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :
- ✓ Tenaga Kerja;
 - ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - ✓ Pangan;
 - ✓ Pertanahan;
 - ✓ Lingkungan Hidup;
 - ✓ Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - ✓ Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - ✓ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ✓ Perhubungan;
 - ✓ Komunikasi dan Informasi;
 - ✓ Koperasi dan UKM;
 - ✓ Penanaman Modal;
 - ✓ Kepemudaan dan Olahraga;
 - ✓ Statistik;
 - ✓ Persandian;
 - ✓ Kebudayaan;
 - ✓ Perpustakaan dan Arsip;
 - ✓ Bencana.
- 2) Urusan Pilihan, yaitu :
- ✓ Perikanan;
 - ✓ Pariwisata;
 - ✓ Pertanian;
 - ✓ Perindustrian; dan
 - ✓ Perdagangan.
- 3) Fungsi Penunjang :
- ✓ Perencanaan;
 - ✓ Keuangan
 - ✓ Kepegawaian dan diklat
 - ✓ Pengawasan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Biak Numfor terletak disebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada $0^{\circ} 55' - 1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ} 47' - 136^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor yaitu 2.602 km² daratan dan luas wilayah perarian yaitu 19.591.63 Km², dan terbagi atas 19 Distrik, 14 Kelurahan dan 257 Kampung.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Biak Numfor memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik

Sebelah Timur : Samudera Pasifik

Sebelah Selatan : Selat Yapen

Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari

10	12-SAMOFA	18.237	17.715	35.952	11.135
11	13-YAWOSI	1.150	1.114	2.264	598
12	14-ANDEY	1.393	1.273	2.666	624
13	15-SWANDIWE	2.223	2.074	4.297	1.049
14	16-BRUYADORI	1.170	1.079	2.249	494
15	17-ORKERI	1.047	922	1.969	499
16	18-POIRU	1.035	880	1.915	498
17	19-AIMANDO PADAIDO	1.306	1.180	2.486	701
18	20-ORIDEK	2.800	2.680	5.480	1.490
19	21-BONDIFUAR	295	262	557	144
	JLH KAB/KOTA	74.758	72.054	146.812	42.812

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

D. PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRK;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- e. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Perikanan
 - h. Dinas Pariwisata
 - i. Dinas Sosial
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
 - p. Dinas Lingkungan Hidup
 - q. Dinas Tenaga Kerja
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - s. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Badan terdiri dari :
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Badan Pendapatan Daerah
 - g. Badan Riset dan Inovasi Daerah
- 6) Distrik terdiri dari :
- a. Distrik Biak Kota
 - b. Distrik Samofa
 - c. Distrik Yendidori
 - d. Distrik Biak Barat
 - e. Distrik Swandiwe
 - f. Distrik Biak Utara

- g. Distrik Andey
- h. Distrik Yawosi
- i. Distrik Warsa
- j. Distrik Bondifuar
- k. Distrik Biak Timur
- l. Distrik Oridek
- m. Distrik Padaido
- n. Distrik Aimando
- o. Distrik Numfor Timur
- p. Distrik Numfor Barat
- q. Distrik Orkeri
- r. Distrik Poiru
- s. Distrik Bruyadori

7) Kelurahan terdiri dari :

- a. Kelurahan Mandala
- b. Kelurahan Fandoi
- c. Kelurahan Burokub
- d. Kelurahan Waupnor
- e. Kelurahan Saramom
- f. Kelurahan Samofa
- g. Kelurahan Brambaken
- h. Kelurahan Karang Mulia
- i. Kelurahan Yafdas
- j. Kelurahan Snerbo
- k. Kelurahan Sorido
- l. Kelurahan Anjereuw
- m. Kelurahan Mansinyas
- n. Kelurahan Yenures

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 6 UPTD yaitu:

- 1) UPTD Metrologi
- 2) UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)
- 3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- 4) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah kelas C (RSUD)
- 5) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- 6) UPTD Pengelolaan Persampahan Tempat Pemrosesan Akhir

E. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga Desember tahun 2024, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mencapai 3.789 Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari :

Tabel 1.2

Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1.803
Perempuan	1.986
Jumlah	3.789

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

2) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :

Tabel 1.3
Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang	Jumlah
IV/e	0
IV/d	0
IV/c	17
IV/b	160
IV/a	239
Jumlah golongan IV	417
III/d	577
III/c	539
III/b	492
III/a	468
Jumlah golongan III	2.094
II/d	287
II/c	378
II/b	346
II/a	210
Jumlah golongan II	1.221
I/d	38
I/c	29
I/b	7
I/a	2
Jumlah golongan I	76
Total Golongan I,II,III & IV	3.789

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- 3) ASN Berdasarkan Jabatan Administrasi dan Fungsional
Kondisi Jabatan ASN pada Setda, Setwan, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD, Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jabatan Administrasi dan Fungsional Tahun 2024

Jabatan Administrasi			Jabatan Fungsional	
Adminstrator	Pengawas	Pelaksana	Keahlian	Keterampilan
1	2	3	4	
172	477	1.273	1.139	694

Sumber Data: BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

F. SUMBER DAYA KEUANGAN

APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1. 5
APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi			Lebih / (Kurang)
			s/d Periode Lalu	Periode Ini	Total	
4	Pendapatan Daerah	1.501.169.251.290,00	0,00	1.442.401.556.301,76	1.442.401.556.301,76	(58.767.694.988,24)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44.021.025.027,00	0,00	30.074.655.808,52	30.074.655.808,52	(13.946.369.218,48)
4.1.1	Pajak Daerah	23.614.582.433,00	0,00	21.312.323.095,00	21.312.323.095,00	(2.302.259.338,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	10.921.173.244,00	0,00	2.293.195.949,00	2.293.195.949,00	(8.627.977.295,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.900.416.991,00	0,00	2.257.355.643,00	2.257.355.643,00	356.938.652,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.584.852.359,00	0,00	4.211.781.121,52	4.211.781.121,52	(3.373.071.237,48)
4.2	Pendapatan Transfer	1.336.948.226.263,00	0,00	1.309.394.061.175,00	1.309.394.061.175,00	(27.554.165.088,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.307.732.025.053,00	0,00	1.283.188.512.054,00	1.283.188.512.054,00	(24.543.512.999,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.216.201.210,00	0,00	26.205.549.121,00	26.205.549.121,00	(3.010.652.089,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	120.200.000.000,00	0,00	102.932.839.318,24	102.932.839.318,24	(17.267.160.681,76)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	120.200.000.000,00	0,00	102.932.839.318,24	102.932.839.318,24	(17.267.160.681,76)
5	Belanja Daerah	1.558.553.213.635,00	0,00	1.426.296.996.677,27	1.426.296.996.677,27	(132.256.216.957,73)
5.1	Belanja Operasi	1.070.799.474.418,00	0,00	990.368.433.732,27	990.368.433.732,27	(80.431.040.685,73)
5.1.1	Belanja Pegawai	410.074.799.096,00	0,00	400.136.626.672,00	400.136.626.672,00	(9.938.172.424,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	539.379.731.972,00	0,00	479.989.073.431,27	479.989.073.431,27	(59.390.658.540,73)
5.1.3	Belanja Bunga	1.400.000.000,00	0,00	1.188.888.696,00	1.188.888.696,00	(211.111.304,00)
5.1.5	Belanja Hibah	106.758.267.850,00	0,00	100.990.767.433,00	100.990.767.433,00	(5.767.500.417,00)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.186.675.500,00	0,00	8.063.077.500,00	8.063.077.500,00	(5.123.598.000,00)

5.2	Belanja Modal	196.492.566.152,00	0,00	165.714.157.526,00	165.714.157.526,00	(30.778.408.626,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.869.949.750,00	0,00	1.369.949.750,00	1.369.949.750,00	(4.500.000.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.640.394.527,00	0,00	26.856.146.616,00	26.856.146.616,00	(6.784.247.911,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.272.601.693,00	0,00	64.354.816.925,00	64.354.816.925,00	(9.917.784.768,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.250.319.182,00	0,00	70.208.717.789,00	70.208.717.789,00	(7.041.601.393,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.459.301.000,00	0,00	2.924.526.446,00	2.924.526.446,00	(2.534.774.554,00)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	0,00	3.225.400.199,00	3.225.400.199,00	(274.599.801,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	0,00	3.225.400.199,00	3.225.400.199,00	(274.599.801,00)
5.4	Belanja Transfer	287.761.173.065,00	0,00	266.989.005.220,00	266.989.005.220,00	(20.772.167.845,00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	284.761.173.065,00	0,00	263.989.005.220,00	263.989.005.220,00	(20.772.167.845,00)
	Surplus / Defisit	(57.383.962.345,00)	0,00	16.104.559.624,49	16.104.559.624,49	73.488.521.969,49
6.1	Penerimaan Pembiayaan	112.953.962.345,00	0,00	50.642.962.345,22	50.642.962.345,22	(62.310.999.999,78)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.642.962.345,00	0,00	25.642.962.345,22	25.642.962.345,22	0,22
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	87.311.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(62.311.000.000,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	55.570.000.000,00	0,00	55.570.000.000,00	55.570.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55.000.000.000,00	0,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	57.383.962.345,00	0,00	(4.927.037.654,78)	(4.927.037.654,78)	(62.310.999.999,78)
	Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0,00	0,00	11.177.521.969,71	11.177.521.969,71	11.177.521.969,71

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2024

G. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi untuk diselaraskan dan disepadankan maka akan berpotensi gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berhadapan langsung dengan Pasifik dan akses laut dan udara cukup terbuka maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu dalam menetapkan isu-isu strategis dalam RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 telah dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka teridentifikasi aspek-aspek lingkungan strategis skala internasional dan nasional dan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut : 342

- 1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Biak Numfor berhubungan dengan masalah pokok antara lain; masih rendahnya akses layanan pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal, nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan,

tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan melanjutkan sekolah (*Expected Years of School*). Pembangunan sumber daya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah klasik yang masih terjadi yaitu kekurangan guru di hampir semua jenjang pendidikan serta peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu – bayi – balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2021, capaian IPM Kabupaten Biak Numfor mencapai nilai 72,33 Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Papua yang sebesar 60,62. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Biak Numfor masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Selain itu, peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor juga perlu mendapatkan perhatian serius mengingat selama ini RSUD Biak telah melayani pasien rujukan di Wilayah Saireri, sehingga kualitas pelayanan perlu lebih ditingkatkan.

Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala.

Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk (perlu disesuaikan dengan data karena Indeks Gini dan PDRB menunjukkan tren positif)

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab Biak Numfor sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024 memperoleh nilai 54,27 (CC)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut masih perlu banyak kinerja yang belum berorientasi pada hasil. Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu; *Specific, Measureable, Attainable, Relevant and Timely*.

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Biak Numfor semakin meningkat yaitu dari Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2019 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2020. Meskipun capaian opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mencapai target RPJMD tahun 2020 namun tetap perlu ditingkatkan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sektor pelayanan publik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dimana kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah masih tergolong rendah dengan tingkat disiplin kerja yang juga masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dari segi inovasi pelayanan publik yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, permasalahan terkait lahan pemerintah yang belum sepenuhnya terselesaikan menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan, sehingga perlu untuk ditangani dengan lebih serius. Belum tuntasnya

penegasan batas wilayah antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan pemerintah Kabupaten Supiori juga menjadi polemik yang perlu mendapatkan perhatian serius.

- 3) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah;

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi kreatif, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan.

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Biak Numfor, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor Perdagangan, belum optimalnya hasil produksi perikanan di Kabupaten Biak Numfor, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk perikanan merupakan produk unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dimana Biak Numfor menjadi target pengembangan kawasan industri perikanan dan pariwisata. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor masih kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Biak. Di sisi pengolahan perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing dengan skala mikro, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan menjadi industri dengan skala lebih besar yang dapat berdampak positif bagi pendapatan asli daerah.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Destinasi wisata bahari yang menjadi unggulan pun belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Mengingat kondisi geografis pulau biak yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Penciptaan *brand identity* sebuah obyek wisata juga belum dilakukan dalam rangka menciptakan *brand image*. Dengan masuknya festival Byak Munara Wampasi dalam kalender tahunan pariwisata nasional diharapkan menjadi daya ungkit bagi perkembangan pariwisata di Kabuten Biak Numfor kedepan.

Dari sektor jasa, perlu adanya pengembangan di bidang jasa transportasi dan perdagangan mengingat letak geografis pulau biak yang cukup strategis akan mempengaruhi daerah-daerah sekitar dan sesuai dengan RTRW Nasional 2007-2027 dimana Biak Numfor diarahkan untuk pengembangan pelabuhan nasional dan bandara pusat penyebaran tersier, sehingga menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menentukan arah kebijakan kedepan.

- 4) Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek;

Penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda

penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir dan rob, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kabupaten Biak Numfor memiliki ketergantungan air baku dari sumber mata air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani wilayah perkotaan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh masyarakat umum ataupun swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan

kenyamanan warga Kabupaten Biak Numfor.

Disisi lain, penanganan permasalahan sampah sampai sejauh ini sudah tertangani dengan cukup baik oleh pemerintah daerah, namun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah sehingga diharapkan dengan pengembangan inovasi Bank Sampah yang lebih optimal mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.



FESTIVAL BIAK MUNARA WAMPASI

STAND BIAK

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2024-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Meningkatkan Kulit Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan mutu pendidikan
		Meningkatnya budaya baca masyarakat
		Terwujudnya Biak Numfor sebagai kota tujuan belajar wilayah Saireri dan Papua
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan pemuda bagi pemuda
		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		Meningkatnya kesempatan kerja
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat
		meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum
terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli biak		
Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan
		meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan

Misi	Tujuan	Sasaran
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi	terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM
		Meningkatkan skala usaha jasa perdagangan
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata	Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat
		Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)
		Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
Misi 4 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak
		Peningkatan akseibilitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah
		Implementasi rencana tata ruang wilayah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
	Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan	
	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah	
Mewujudkan kesadaran pengelolaan lingkungan dalam pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan	

Sumber Data: RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024- 2029

A. PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024–2026, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang ditanda tangani Bupati Biak Numfor. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB Perkapitas	52,02% Rp. 42.792.656
3	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Wilayah	2,60
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	55,02
5.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Harapan Lama Sekolah	10,75 Tahun 14,32 Tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,7 Tahun
7.	Meningkatnya Partisipasi dan Daya Saing Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	1. Persentase pemuda terampil 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Indeks Pembangunan Gender	61% 73,1% 90,43
8.	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial dan Pengendalian Penduduk	1. Persentase Penduduk Miskin 2. Gini Rasio 3. Rasio Penduduk Ber KTP 4. Total Fertility Rate	24,06% 0,369 79,79% 25/1000 Perempuan
9.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Demokrasi	54,40
10.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	15,52%
11.	Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Promosi Wisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	4 Hari

12.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan ekspansi produksi lokal	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,5%
13.	Menguatnya Industri dan Perdagangan yang berdaya saing	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4,33%
		2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,33%
		3. Laju Inflasi	1,52%
		4. Persentase Pertumbuhan UMKM	20%
14.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65%
15.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,52
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	60%
17.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80%
18.	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Sedang
19.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1. Indeks Desa Membangun	0.5885
		2. Nilai AKIP	62,68
		3. Indeks Merit Sistem	0,41
		4. Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	7
		5. Opini BPK	WTP
20.	Meningkatnya Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	40 Lokasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidak berhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran, dimana analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian

kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tidak berhasil pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, tabel berikut menggambarkan predikat nilai capaian kinerja yang diperoleh.

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri 86 Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja yang termuat didalam Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	102,37	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing	2	72,59	Sedang
3.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	1	101	Sangat Tinggi
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	1	61,77	Rendah
5.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	2	98,78	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	103,23	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Partisipasi dan Daya Saing Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	3	71,04	Sedang
8.	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial dan Pengendalian Penduduk	4	115,47	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Partisipasi Politik Masyarakat	1	-	-
10.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1	105,02	Sangat Tinggi
11.	Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Promosi Wisata	1	40,75	Sangat Rendah
12.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dan Ekspansi Produksi Lokal	1	92	Sangat Tinggi
13.	Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing	4	71,67	Sedang
14.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1	70,86	Sedang
15.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	1	100,54	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	1	83,33	Tinggi
17.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika	1	83,73	Tinggi
18.	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat	1	100	Sangat Tinggi
19.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	5	105,58	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
20.	Meningkatnya Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	1	75	Sedang
Jumlah		34	82,74	Tinggi

Sumber Data : Tim SAKIP Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Hasil capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar **82,74%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis dan berdasarkan hasil pengukuran pada tabel di atas sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis dari 18 (delapan belas) indikator terealisasi dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, 2 (dua) sasaran strategis dari 2 (dua) indikator terealisasi dengan predikat kinerja Tinggi, 5 (lima) sasaran strategis dari 11 (sebelas) indikator terealisasi dengan predikat Sedang, 1 (satu) sasaran strategis dari 1 (satu) indikator dengan predikat Rendah, 1 (satu) sasaran strategis dari 1 (satu) indikator dengan predikat Sangat Rendah dan 1 (satu) sasaran strategis dari 1 (satu) indikator tanpa realisasi. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sasaran 1	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21	74,95	102,37
Sasaran 2	2. Pertumbuhan Ekonomi	5,02%	2,28%	45,41
	3. PDRB Perkapita	Rp. 42.792.656	Rp. 42.700.957	99,78
Sasaran 3	4. Indeks Infrastruktur Wilayah	2,60	2,62	101
Sasaran 4	5. Indeks Reformasi Birokrasi	55,01	33,98*	61,77
Sasaran 5	6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,75 Tahun	10,55 Tahun	98,13
	7. Harapan Lama Sekolah	14,32 Tahun	14,24 Tahun	99,44

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sasaran 6	8. Usia Harapan Hidup	68,7 Tahun	70,92 Tahun	103,23
Sasaran 7	9. Persentase Pemuda Terampil	61%	6,66%	10,91
	10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,1%	74,06%	101,31
	11. Indeks Pembangunan Gender	90,43	91,25	100,90
Sasaran 8	12. Persentase Penduduk Miskin	24,06%	24,11%	100,21
	13. Gini Rasio	0,369	0,374	101,35
	14. Rasio Penduduk Ber KTP	79,79%	86,45%	108,35
	15. Total Fertility Rate	25/1000 Perempuan	38/1000 Perempuan	152
Sasaran 9	16. Indeks Demokrasi	54,40	-	-
Sasaran 10	17. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	15,52%	16,30%	105,02
Sasaran 11	18. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	4 Hari	1,63 Hari	40,75
Sasaran 12	19. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,5%	4,14%*	92
Sasaran 13	20. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4,33%	3,83%	88,45
	21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,33%	18,01%	98,25
	22. Laju Inflasi	1,52%	N/A	-
	23. Persentase Pertumbuhan UMKM	20%	20%	100
Sasaran 14	24. Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65%	46,06%	70,86
Sasaran 15	25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,52	79,95	100,54
Sasaran 16	26. Cakupan Layanan Transportasi	60%	50%	83,33
Sasaran 17	27. Cakupan Layanan Telekomunikasi	80%	66,99%	83,73
Sasaran 18	28. Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	100

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sasaran 19	29. Indeks Desa Membangun	0,5885	0,5797	98,50
	30. Nilai AKIP	62,68	54,27	86,58
	31. Indeks Merit Sistem	0,41	0,41	100
	32. Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	7	10	142,85
	33. Opini BPK	WTP	WTP*	100
Sasaran 20	34. Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	40 Lokasi	30 Lokasi	75
Rata-Rata Capaian				82,74

Sumber Data : Tim SAKIP Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Ket : N/A : Nilai belum ada

- : Data tidak ada

*) : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023.

Dilihat dari realisasi selama masa periode RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 pada dasarnya menunjukkan progress realisasi yang positif pada sebagian besar indikator.

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja dan Target RPD Kabupaten Biak Numfor

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AWAL RPD (2024)	REALISASI 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,21	74,95
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02%	2,28%
3.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	Rp. 42.792.656	Rp. 42.700.957
4.	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	2,60	2,62
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,01	N/A
6.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,75 Tahun	10,55 Tahun
7.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,32 Tahun	14,24 Tahun
8.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,7 Tahun	70,92 Tahun
9.	Persentase Pemuda Terampil	Persen	61%	6,66%
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	73,1%	74,06%

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AWAL RPD (2024)	REALISASI 2024
11.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,43	91,25
12.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	24,06%	24,11%
13.	Gini Rasio	Indeks	0,369	0,374
14.	Rasio Penduduk Ber KTP	Persen	79,79%	86,45%
15.	Total Fertility Rate	Per 1000 Perempuan	25/1000 Perempuan	38/1000 Perempuan
16.	Indeks Demokrasi	Indeks	54,40	-
17.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	15,52%	16,30%
18.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4 Hari	1,63 Hari
19.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,5%	N/A
20.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	4,33%	3,83%
21.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	18,33%	18,01%
22.	Laju Inflasi	Persen	1,52%	N/A
23.	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	20%	20%
24.	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	65%	46,06%
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,52	79,95
26.	Cakupan Layanan Transportasi	Persen	60%	50%
27.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	80%	66,99%
28.	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Sedang	Sedang
29.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5885	0,5797
30.	Nilai AKIP	Nilai	62,68	54,27
31.	Indeks Merit Sistem	Indeks	0,41	0,41
32.	Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	Jumlah	7	10
33.	Opini BPK	Disclaimer/ WDP/ WTP	WTP	N/A
34.	Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah	40 Lokasi	30 Lokasi

Sumber Data : Tim SAKIP Kab. Biak Numfor Tahun 2024

N/A : Nilai belum ada

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1

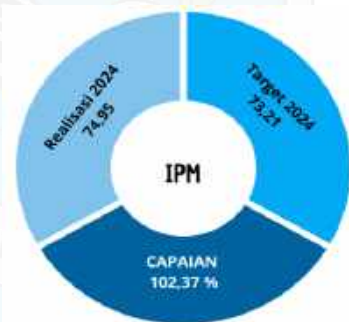
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator adalah 102,37% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21	74,95	102,37

Cakupan indikator diatas merupakan indikator yang bersifat makro yang datanya berasal dari publish resmi data statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik, yang capaiannya merupakan kontribusi dari beberapa perangkat daerah sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai *leading sector* yang mengakomodir data pembangunan daerah bertanggungjawab sebagai penyaji data.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan meningkat, dan dimensi standar hidup layak.



Pembangunan Manusia di Kabupaten Biak Numfor terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Biak Numfor telah mencapai 74,95. Angka IPM tahun 2024 tersebut naik tipis sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,45.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21	74,95	74,45

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain:
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Membangun sarana dan sistem pendidikan yang baik;
 - 2) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara merata;
 - 3) Meningkatkan investasi pendidikan dan kesehatan;
 - 4) Ketersediaan Layanan Kesehatan;
 - 5) Peningkatan layanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan layanan kuratif dan rehabilitatif;
 - 6) Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu;
 - 7) Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang layak;
 - 8) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
 - **Faktor Penghambat :**
 - 1) Sebaran tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum merata;
 - 2) Angka kemiskinan yang masih tinggi;
 - 3) Tingkat pengangguran terbuka yang meningkat.

- Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan IPM tidak lepas dari upaya konsisten dan kolaboratif yang telah dilakukan. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tahun 2024 sebagai berikut :
 - 1) Dukungan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN;
 - 2) Memberikan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik (medik umum dan medik spesialis) dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan nonmedik;
 - 3) Peningkatan infrastruktur kesehatan;
 - 4) Pemantauan posyandu binaan dan orientasi pencegahan dan penanggulangan stunting oleh kader posyandu;
 - 5) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lansia dan balita;
 - 6) Penyerahan bantuan bagi kader posyandu dan anak stunting;
 - 7) Gerakan intervensi serentak stunting di 297 posyandu dengan sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita;
 - 8) Memberikan stimulan berupa Kartu Biak Pintar sebagai sarana agar peserta didik dapat melengkapi kebutuhan sekolah;
 - 9) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui rehab dan bangun baru bangunan pendidikan;
 - 10) Sosialisasi pendidikan;
 - 11) Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - 12) Penyaluran bantuan untuk lansia dan disabilitas melalui dana Otsus;
 - 13) Updating data kemiskinan sebagai dasar pensasaran kegiatan selanjutnya;
 - 14) Pemberdayaa bagi OAP melalui kegiatan kewirausahaan.

- Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan beberapa program/kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian IPM sebagai berikut :
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - 2) Program Pengembangan Kurikulum (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan/ RSUD);
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan);
 - 5) Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (Dinas Kesehatan);
 - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan);
 - 7) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 - 8) Program Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 - 9) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial);
 - 10) Program Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial);
 - 11) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja).

Gambar 3.1
Pengerjaan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan



Gambar 3.2
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan



Gambar 3.3
Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil



Gambar 3.4
Sosialisasi Pendidikan



Gambar 3.5
Penanganan Kemiskinan Ekstrem



- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis pertama yang dilaksanakan oleh OPD terkait dengan anggaran sebesar Rp. 258.508.948.704,- terealisasi sebesar Rp. 219.765.185.841,- (85,01%). Dengan realisasi anggaran sebesar 85,01% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,37%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran pertama dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,87	74,45	74,95	73,21	73,39	73,57

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Sasaran 2
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-2 (dua) dengan 2 (dua) indikator adalah 72,59% dengan predikat kinerja “Sedang”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,02 %	2,28 %	45,41
2.	PDRB Perkapita	Rp. 42.792.656	Rp. 42.700.957	99,78
Rata-Rata Capaian				72,59

Cakupan indikator diatas merupakan indikator yang bersifat makro yang datanya berasal dari publish resmi data statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik, yang capaiannya merupakan kontribusi dari beberapa perangkat daerah sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai *leading sector* yang mengakomodir data pembangunan daerah bertanggungjawab sebagai penyaji data.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diukur sebagai persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan seberapa cepat suatu wilayah menghasilkan barang dan jasa dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu



tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024 mencapai 2,28 persen, angka ini menurun 0,96 persen dari tahun 2023 dengan realisasi 3,24 persen. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 juga belum memenuhi target daerah dimana target tahun 2024 sebesar 5,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi ditahun 2024 yang mencapai 2,28 persen berarti capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah 45,41 persen.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 2
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,02 %	2,28 %	3,24 %

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain :
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Penyederhanaan birokrasi dan perizinan online (OSS) mendorong pendirian usaha;
 - 2) Kepastian hukum dan perlindungan hak properti menciptakan kepercayaan investor;
 - 3) Eksploitasi SDA yang ramah lingkungan (misalnya, ekowisata, pertanian organik);
 - 4) Mengurangi ketergantungan pada SDA dengan mengembangkan sektor jasa, manufaktur, atau pariwisata;
 - 5) Promosi produk unggulan daerah ke pasar nasional/internasional;
 - 6) Jaringan transportasi yang efisien untuk memperluas jangkauan pasar;
 - 7) Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
 - 8) Pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan dan akses modal untuk usaha mikro;
 - 9) Memanfaatkan budaya dan tradisi untuk pengembangan pariwisata atau produk lokal.
 - **Faktor Penghambat :**
 - 1) Alokasi anggaran tersebar tanpa fokus pada sektor potensial;
 - 2) Pergantian kepala daerah mengakibatkan pergantian kebijakan dan pembatalan program strategis;
 - 3) Tidak mengembangkan sektor alternatif seperti industri kreatif, teknologi, atau jasa;
 - 4) Jalan, irigasi, atau listrik rusak mengurangi produktivitas ekonomi;

- 5) Akses internet terbatas menghambat pertumbuhan UMKM digital;
- 6) Proses izin usaha yang panjang dan mahal menurunkan minat investasi;
- 7) Rendahnya daya beli masyarakat menghambat pertumbuhan sektor riil;
- 8) Perebutan sumber daya antar kelompok (misalnya, lahan atau SDA) mengganggu stabilitas usaha;
- 9) Iklim Investasi yang kurang kondusif;
- 10) Promosi yang lemah atau tidak ada strategi pemasaran potensi daerah ke investor domestik/asing;
- 11) Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, sehingga bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 12) Tidak mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, atau aset daerah.

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Berkelanjutan, Fokus pada ekonomi biru dan industri kreatif;
- 2) Sinergi Pusat-Daerah, harmonisasi kebijakan dan dukungan teknis/finansial;
- 3) Melakukan pemantauan perizinan berusaha terhadap kegiatan Pelaku Usaha;
- 4) Menyusun kajian Peluang Investasi Daerah;
- 5) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dengan kebijakan Penanaman Modal;
- 6) Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui potensi unggulan daerah;
- 7) Ekspor ikan;
- 8) Pengembangan Pariwisata;
- 9) Upaya pengendalian inflasi.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui beberapa OPD terkait telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Dinas Perikanan);
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan);
 - 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan (Dinas Perikanan);
 - 4) Program Pemasaran Pariwisata (Dinas Pariwisata);
 - 5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Dinas Pariwisata);
 - 6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata);
 - 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
 - 8) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
 - 9) Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
 - 10) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
 - 11) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
 - 12) Program Pengembangan Ekspor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
 - 13) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);

- 14) Program Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- 15) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- 16) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Dinas Koperasi dan UMKM);
- 17) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Dinas Koperasi dan UMKM);
- 18) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (Dinas Koperasi dan UMKM);
- 19) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- 20) Program Pelayanan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- 21) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Gambar 3.6
Operasi Pasar Murah



2. PDRB Perkapita

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh



penduduk wilayah tersebut atau bukan. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB perkapita merupakan indikator yang paling umum untuk menggambarkan ukuran standar hidup dan tingkat kemakmuran suatu daerah, PDRB Perkapita dapat menggambarkan seberapa besar rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk. Pada tahun 2024, realisasi PDRB perkapita Kabupaten Biak Numfor mencapai Rp.42.700.957,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.42.792.656,- dengan presentase capaian 99,78%.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 2
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
2.	PDRB Perkapita	Rp. 42.792.656	Rp. 42.700.957	Rp. 42.615.276

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan PDRB perkapita antara lain :

- **Faktor Keberhasilan:**

- 1) Pelatihan manajemen, akses modal, dan pemasaran digital membantu UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja;
- 2) UMKM masuk *platform e-commerce*, penggunaan *fintech* untuk akses keuangan;
- 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif, Industri kreatif (seni, kuliner, teknologi) berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- 4) Insentif Fiskal: Potongan pajak atau kemudahan perizinan untuk menarik investor;
- 5) Melakukan promosi potensi daerah berupa pemasaran destinasi wisata atau produk lokal ke pasar nasional/internasional;
- 6) Pengembangan destinasi wisata unik dengan melibatkan masyarakat lokal;
- 7) Penggunaan bibit unggul, irigasi tepat guna, dan pemasaran produk pertanian berbasis digital.

- **Faktor Penghambat :**

- 1) Alokasi anggaran tersebar ke sektor tidak produktif, mengabaikan sektor unggulan (misalnya, UMKM, pariwisata, atau teknologi);
- 2) Bergantung pada satu sektor (misalnya, pertambangan, pertanian tradisional) yang rentan fluktuasi harga global;
- 3) Tidak mengembangkan sektor bernilai tambah tinggi seperti industri pengolahan, jasa, atau ekonomi kreatif;
- 4) Infrastruktur rusak mengurangi produktivitas sektor ekonomi;

- 5) Proses izin usaha rumit dan mahal, menghambat investasi dan pendirian usaha baru;
- 6) Kebijakan daerah tidak selaras dengan pusat, menciptakan ketidakpastian hukum;
- 7) Pertumbuhan ekonomi "terencer" oleh populasi yang meningkat cepat;
- 8) UMKM sulit berkembang karena minimnya program kredit atau pendampingan;
- 9) Daya beli rendah menghambat pertumbuhan sektor riil;
- 10) Ekspor sumber daya alam tanpa industri pengolahan, sehingga nilai tambah rendah;
- 11) Data ekonomi tidak transparan, menyulitkan analisis investasi;
- 12) Tidak mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, atau aset publik.

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan PDRB perkapita sebagai berikut :

- 1) Perencanaan menggunakan data demografi dan ekonomi yang akurat;
- 2) Penyederhanaan perizinan;
- 3) Mengembangkan sektor unggulan baru berbasis potensi lokal;
- 4) Fokus pada program berkelanjutan yang memacu produktivitas dan pemerataan.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan beberapa program/kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam memenuhi target indikator PDRB perkapita, yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Dinas Perikanan);

- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan);
- 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan (Dinas Perikanan);
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata);
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- 7) Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- 8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- 9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- 10) Program Pengembangan Ekspor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- 11) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- 12) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Dinas Koperasi dan UMKM);
- 13) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Dinas Koperasi dan UMKM).

Gambar 3.7
Panen Cabe di Balai Benih Utama (BBU) Maneru Kampung, Dernafi Distrik Biak Utara



Gambar 3.8
Ekspor Ikan ke Jepang



Gambar 3.9
Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Pertanian dan Perikanan
Pemerintah Kab. Biaik Numfor dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah



- ✚ Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 (dua) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan anggaran sebesar Rp. 69.956.650.226,- terealisasi sebesar Rp.

63.050.013.827,- (90,13%). Dengan realisasi anggaran sebesar 90,13% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 72,59%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-2 (dua) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2
Terhadap Target RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,89%	3,24%	2,28 %	5,02%	5,04%	5,06%
2.	PDRB Perkapita	Rp. 43.190.959	Rp. 42.615.276	Rp. 42.700.957	Rp. 42.792.656	Rp. 43.538.630	Rp. 44.295.539

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Sasaran 3
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-3 (tiga) dengan 1 (satu) indikator adalah 101% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Wilayah	2,60	2,62	101

Cakupan indikator diatas merupakan indikator yang bersifat makro yang datanya berasal dari publish resmi data statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik, yang capaiannya merupakan kontribusi dari beberapa perangkat daerah sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai leading sector yang mengakomodir data pembangunan daerah bertanggungjawab sebagai penyaji data.



Indeks Infrastruktur Wilayah adalah sebuah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota). Indeks ini membantu pemerintah, peneliti, dan pemangku kepentingan memahami sejauh mana infrastruktur suatu daerah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan

Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah 2,62 atau telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 2,60 yang berarti capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah 101 persen.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Indeks Infrastruktur Wilayah	2,60	2,62	2,58

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan indeks infrastruktur wilayah, antara lain :
 - **Faktor Keberhasilan :**
Keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Wilayah memerlukan kebijakan terintegrasi, tata kelola transparan, dan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah perlu fokus pada program berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan pemerataan akses infrastruktur untuk semua lapisan masyarakat.
 - **Faktor Penghambat :**
Tata kelola belum optimal, keterbatasan anggaran, geografis ekstrem, dan konflik sosial-politik. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tanpa penanganan menyeluruh, ketimpangan infrastruktur antarwilayah akan terus melebar.
- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan indeks infrastruktur wilayah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota;
- 2) Ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur;
- 3) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan layanan transportasi;
- 5) Meningkatkan layanan telekomunikasi.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui OPD terkait telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator indeks infrastruktur wilayah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Dinas PU-PR);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Dinas PU-PR);
- 3) Program pengelolaan Sumber daya air (Dinas PU-PR);
- 4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dinas PU-PR);
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan (Dinas PU-PR);
- 6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Dinas Perhubungan);
- 7) Program Pengelolaan Pelayaran (Dinas Perhubungan);
- 8) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika);
- 9) Program Aplikasi Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika).

Gambar 3.10
Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan



Gambar 3.11
Pembangunan Jaringan Air Bersih



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 (tiga) yang dilaksanakan oleh OPD terkait dengan anggaran sebesar Rp. 72.645.681.092,- terealisasi sebesar Rp. 66.165.817.627,- (91,08%). Dengan realisasi anggaran sebesar 91,06% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 101%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-3 (tiga) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3
Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Indeks Infrastruktur Wilayah	2,53	2,58	2,62	2,60	2,62	2,64

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 4

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN, DAN MELAYANI

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-4 (empat) dengan 1 (satu) indikator adalah 61,77% dengan predikat kinerja “ Rendah”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	55,01	33,98*	61,77

Ket : *) : Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan realisasi tahun 2023.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design*



Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada tahun 2024 untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat dibandingkan antara target tahun 2024 dan realisasi 2024, hal ini dikarenakan masih dalam proses penilaian atau evaluasi oleh KEMENPANRB. Sehingga untuk menghitung capaian kinerja menggunakan realisasi tahun 2023 sebagai pengukur tercapainya target indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dimana target tahun 2024 adalah 55,01 dan realisasi tahun 2023 adalah 33,98 dengan presentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 61,77%.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	55,01	N/A	33,98

Ket : N/A : Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB.

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain :
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Adanya koordinasi yang baik antara Tim RB Kabupaten dan OPD pelaksana monitoring evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB Tahun 2024;
 - 2) Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik serta melakukan pendampingan terkait pelaksanaan

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;

- 3) Melaksanakan kegiatan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dengan mengisi Survei Indeks BerAKHLAK dan Evaluasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK;
- 4) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standard pelayanan publik.

- **Faktor Penghambat :**

- 1) Belum terlaksananya sebagian besar Rencana Aksi RB Tahun 2024 dikarenakan belum dianggarkan;
 - 2) Kurangnya pemahaman OPD pelaksana RB tentang RB General dan RB Tematik;
 - 3) Penyampaian data realisasi rencana aksi RB pertriwulan dari OPD belum tepat waktu.
- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan rapat evaluasi internal Tim RB Kabupaten Biak Numfor;
 - 2) Menyusun Rencana Aksi RB General dan RB Tematik di tahun yang akan datang agar lebih berorientasi dalam pencapaian target sasaran kinerja utama RB General dan pencapaian indikator keberhasilan RB Tematik;
 - 3) Meningkatkan koordinasi Tim RB Kabupaten dan OPD pelaksana monitoring evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB.
 - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Organisasi Setda telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator indeks infrastruktur wilayah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat evaluasi Tim RB Kabupaten (Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Biak Numfor) secara berkala;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana aksi RB pertriwulan.

Gambar 3.12

Rapat Evaluasi Internal TIM RB Kabupaten



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-4 (empat) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda dengan anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-. Dengan realisasi dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 61,77%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-4 (empat) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut .

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4
Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	49,04	33,98	N/A	55,01	58,26	61,71

Ket : N/A : Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB.
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 5

MENINGKATNYA AKESSESIBILITAS DAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-5 (lima) dengan 2 (dua) indikator adalah 98,78% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,75 Tahun	10,55 Tahun	98,13
2.	Harapan Lama Sekolah	14,32 Tahun	14,24 Tahun	99,44
Rata-Rata Capaian				98,78

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal, Angka RLS yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan yang lebih



lama atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rata-Rata Lama Sekolah adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS), Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1} x_i$$

Dimana :

- RLS adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas.
- x_i adalah lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun ke atas.
- n adalah jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2024 untuk usia 25 tahun ke atas adalah 8,85 tahun, atau setara dengan kelas 3 (tiga) SMP. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia untuk usia tujuh tahun adalah 13,21 tahun, atau setara dengan kuliah tahun kedua.

Di Papua, rata-rata lama sekolah untuk pelajar laki-laki adalah 10,46 tahun, sedangkan untuk pelajar perempuan adalah 7,88 tahun. RLS dihitung berdasarkan jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal. Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi seperti partisipasi sekolah, jenjang dan

jenis pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh, serta ijazah tertinggi yang dimiliki.

Realisasi indikator kinerja Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 yaitu 10,55 tahun dari target 10,75 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,13%. Realisasi ini dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dari realisasi tahun 2023 sebesar 10,53 tahun. Dengan semakin tingginya RLS maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

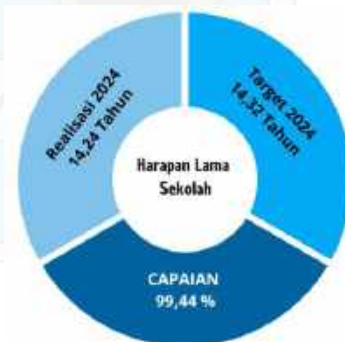
Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 5
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,75 Tahun	10,55 Tahun	10,53 Tahun

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2024

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, Angka HLS yang meningkat menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah.



Pada tahun 2024 HLS di Indonesia mencapai 13,21 tahun, meningkat 0,06 tahun dari tahun 2023. Angka ini setara dengan lama sekolah hingga ke jenjang perkuliahan tahun pertama. Beberapa faktor yang memengaruhi angka HLS, di antaranya Persentase Penduduk Miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita, Rasio Fasilitas Pendidikan, dan Angka Partisipasi Murni (APM). Formulasi perhitungan Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut :

$$EYS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$$

Dimana:

- EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
- E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
- P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
- i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;
- FK : Faktor koreksi.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator nilai ujian sekolah dan hasil Assesment Nasional Berbasis Komputer tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2024 yaitu 14,24 tahun dari target 14,32 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,44%. Realisasi ini dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dari realisasi tahun 2023 sebesar 14,22 tahun. Dengan semakin tingginya HLS maka Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya..

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 5
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
2.	Harapan Lama Sekolah	14,32 Tahun	14,24 Tahun	14,22 Tahun

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam meningkatkan capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah, antara lain :

- Faktor Keberhasilan :

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi;
- 2) Adanya Bantuan Pendidikan melalui APBD untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi.

- Faktor Penghambat :

Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak.

✚ Adapun upaya/solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah, sebagai berikut :

- 1) Menambah pagu anggaran guna dapat menjangkau penerima manfaat secara lebih luas dan merata;
- 2) Optimalisasi Angka Sebaran Guru agar jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebar secara merata guna dapat memenuhi aspek pemenuhan layanan akses kepada penerima layanan Pendidikan.

✚ Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bantuan Program Kartu Biak Pintar Jenjang SD;
- 2) Bantuan Program Kartu Biak Pintar Jenjang PAUD;
- 3) Bantuan Program Kartu Biak Pintar Jenjang SMA;
- 4) Bantuan Program Kartu Biak Pintar Jenjang SMK;
- 5) Bantuan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa SMK.

Gambar 3.13
Proses Realisasi Kartu Biak Pintar 2024





- ✚ **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-5 (lima) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.105.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 5.105.000.000 ,- (100%). Dengan realisasi anggaran sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 98,78%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-5 (lima) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,49 Tahun	10,53 Tahun	10,55 Tahun	10,75 Tahun	10,86 Tahun	10,97 Tahun
2.	Harapan Lama Sekolah	14,21 Tahun	14,22 Tahun	14,24 Tahun	14,32 Tahun	14,37 Tahun	14,43 Tahun

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 6
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-6 (enam) dengan 1 (satu) indikator adalah 103,23% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Usia Harapan Hidup	68,7 Tahun	70,92 Tahun	103,23

Usia harapan hidup (UHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (ASDR). ASDR (Age Specific Death Rate) atau angka kematian spesifik menurut umur merupakan data yang diperoleh dari catatan registrasi kematian secara tahunan. Usia harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir dan dapat menjadi tolok ukur seberapa baik taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Usia Harapan Hidup tahun 2024 memiliki target sebesar 68,7 tahun dengan realisasi sebesar 70,92 tahun dan persentase capaian sebesar 103,23%, apabila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan capaian sebesar 0,17 pada indikator Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Biak Numfor.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Usia Harapan Hidup	68,7 Tahun	70,92 Tahun	70,75 Tahun

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator usia harapan hidup :
 - **Faktor Keberhasilan** : Faktor-faktor ini dilakukan dengan sosialisasi oleh petugas kesehatan ke masyarakat dengan harapan ada perubahan gaya hidup diantaranya :
 - 1) Faktor Ekonomi seperti : Pendapatan, Tingkat Pekerjaan, dan Ketersediaan Makanan;
 - 2) Faktor Sosial seperti : Lingkungan Sosial yang mendukung, Pendidikan, dan Tingkat Urbanisasi;
 - 3) Faktor Lingkungan seperti : Kualitas Udara dan Air, Sanitasi, dan Polusi;
 - 4) Faktor Kesehatan seperti : Akses ke Layanan Kesehatan, Vaksinasi, dan Pengobatan Penyakit;
 - 5) Faktor Gaya Hidup seperti : Pola Makan, Olahraga, dan Kebiasaan Merokok;
 - 6) Faktor Genetik dan Kesehatan Keluarga;
 - 7) Faktor Keturunan.
 - **Faktor Penghambat** :
 - 1) Pelayanan kesehatan yang belum maksimal;
 - 2) Belum teratasi penyakit menular;
 - 3) Mulai berkembang penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus;
 - 4) Perubahan gaya hidup yaitu kurang beraktifitas fisik;
 - 5) Obesitas dari diet yang tidak sehat;
 - 6) Tingkat Konsumsi alkohol dan merokok;

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) dengan sosialisasi terkait pola hidup sehat dan proteksi kesehatan, seperti :
 - 1) Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein rendah lemak;
 - 2) Mengurangi konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh;
 - 3) Berolahraga secara teratur;
 - 4) Istirahat yang cukup;
 - 5) Menghindari merokok dan minuman beralkohol;
 - 6) Mengelola stres dengan baik;
 - 7) Menjaga kualitas lingkungan hidup seperti memastikan udara dan air bersih;
 - 8) Memiliki asuransi kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan;
 - 9) Rutin melakukan pengecekan kesehatan;
 - 10) Memperhatikan kesehatan mental, seperti menghindari stres, berbicara dengan teman atau keluarga, dan melakukan aktifitas yang menyenangkan.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Usia Harapan Hidup (UHH), yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - 3) Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Imunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting;
 - 4) Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal,

- Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll);
- 5) Perbaiki kesehatan lingkungan pada masyarakat;
 - 6) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 7) Memperbaiki status gisi keluarga.

Gambar 3.14
Kegiatan Sosialisasi Germas



Gambar 3.15
PMT Balita Pencegahan Stunting



Gambar 3.16
Pelaksanaan Kegiatan PONEB



Gambar 3.17
Perbaikan Status Gizi



Gambar 3.18.
Perbaikan Kesehatan lingkungan



Gambar 3.19
Peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-6 (enam) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 82.730.508.500,- terealisasi sebesar Rp. 69.749.478.793 ,- (84,30%). Dengan realisasi anggaran sebesar 84,30% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 103,23%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-6 (enam) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6
Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Usia Harapan Hidup	70,56 Tahun	70,75 Tahun	70,92 Tahun	68,7 Tahun	68,8 Tahun	68,9 Tahun

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 7
MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN DAYA SAING PEMUDA
DAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-7 (tujuh) dengan 3 (tiga) indikator adalah 71,04% dengan predikat kinerja “Sedang”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pemuda Terampil	61%	6,66%	10,91
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,1%	74,06%	101,31
3.	Indeks Pembangunan Gender	90,43	91,25	100,90
Rata-Rata Capaian				71,04

1. Persentase Pemuda Terampil

Persentase pemuda terampil adalah bentuk peran pemuda yang sangat besar dan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, baik sebagai tenaga kerja yang terampil maupun sebagai wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja baru. Pemuda yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap teknologi digital dapat mendorong ekonomi kreatif perkembangan.



Capaian indikator persentase pemuda terampil di hitung menggunakan rumus formulasi jumlah pemuda yang mendapatkan sertifikat dibagi total pemuda yang mengikuti pelatihan dikali seratus 100. Dimana jumlah pemuda yang mendapatkan sertifikat saat mengikuti kegiatan pelatihan berjumlah 10 orang sedangkan jumlah keseluruhan pemuda yang mengikuti kegiatan pelatihan berjumlah 150 orang. Sehingga realisasi indikator persentase pemuda terampil tahun 2024 sebesar 6,66%, realisasi ini sangat jauh atau masih sangat rendah dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 61% dengan presentase capaian sebesar 10,91%.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jmlh Pemuda yang mendapatkan sertifikat}}{\text{Total Pemuda yg mengikuti pelatih}} \times 100\% \\ &= \frac{10 \text{ orang}}{150 \text{ orang}} \times 100\% = 6,66\% \end{aligned}$$

Menurut Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Biak Numfor oleh Tim Asistensi KEMENPANRB, untuk indikator persentase pemuda terampil belum cukup outcome dan relevan untuk mengukur tujuan yang diharapkan sehingga indikator ini akan direvisi kembali.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 7
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1.	Persentase Pemuda Terampil	61%	6,66%	71,4%

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator persentase pemuda terampil :
 - 1) Untuk mendorong pemuda yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap teknologi digital perlu terus di dukung dengan kebijakan yang mempermudah akses permodalan, pelatihan keterampilan dan peluang kolaborasi;
 - 2) Pada Tahun 2024, Rencana pemberian Modal usaha bagi 19 OKP namun yang terealisasi hanya 4 OKP sehingga menjadi kendala dalam mengembangkan atau mendorong kemajuan dalam Kreaktifitas Pemuda.

- Adapun upaya/solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase pemuda terampil, sebagai berikut :
 - 1) Di tingkatannya program - program pembinaan usia (16 s/d 30 tahun) ;
 - 2) Melakukan pembinaan serta pelatihan;
 - 3) Memberikan Modal Usaha bagi Pemuda yang sedang memiliki usaha.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator persentase pemuda terampil, sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota;
 - 2) Menunjang dan memberikan modal usaha bagi pemuda yang memulai usaha;
 - 3) Memantau Kelancaran/usaha bagi Pemuda yang di berikan modal usaha.

Gambar 3.20
Kegiatan Sosialisasi Penyadaran, pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda.



2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada waktu dalam periode survei.

Dalam kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Hal serupa juga terjadi pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 74,06% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 73,1% dengan presentase capaian sebesar 101,31%. Hal ini menjelaskan bahwa banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di tahun 2024, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 realisasi TPAK mencapai 65,97%, lebih rendah dari realisasi tahun 2024.



Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 7
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,1%	74,06%	65,97%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam mencapai indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagai berikut:
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi;
 - 2) Upah minimum yang tinggi ;
 - 3) Penempatan tenaga kerja khususnya CPNS dan tenaga P3K ;
 - 4) Ketersediaan Tenaga Kerja yang siap pakai melalui Pelatihan.
 - **Faktor Penghambat :**
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM yang ada maka perlu lebih ditingkatkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketugasannya, utamanya merealisasikan keseluruhan program kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor;
 - 2) Perlu adanya Job Fair atau pameran bursa kerja yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebagai wadah perekrutan dan penempatan pencari kerja sesuai criteria persyaratan yang di perlukan perusahaan;
 - 3) Belum optimalnya penyelesaian kasus karena belum adanya titik temu antara pihak pekerja dan pengusaha saat terjadi perselisihan sehingga perlu adanya rasa saling pengertian dan perlu adanya sosialisasi yang masif tentang ketenagakerjaan.

- Adapun upaya/solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagai berikut :
 - 1) Kartu Prakerja dengan berbagai fasilitas pelatihan bagi pencari kerja;
 - 2) Dilaksanakannya Jobfair yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang berada pada Kabupaten Biak Numfor, Papua dan Indonesia;
 - 3) Pelatihan bagi tenaga kerja secara continue serta bantuan peralatan.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagai berikut:
 - 1) Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2) Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pekerja;
 - 3) Pemberdayaan bagi OAP melalui kegiatan Kewirausahaan;
 - 4) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Gambar 3.21
Kegiatan Bursa Kerja Khusus Tahun 2024
Pelaksanaan Melibatkan 400 Peserta Terkhusus Siswa SMK
di Kabupaten Biak Numfor



Gambar 3.22
Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2024
Yang Melibatkan 100 Peserta Pencari Kerja Dari 3 (tiga) Distrik di
Kabupaten Biak Numfor Dengan Narasumber dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Pasarkerja.id)



3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur kesetaraan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM,



tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.

Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 91,25 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 90,43 dengan presentase capaian sebesar 100,90%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 4,03 dari realisasi tahun 2023 sebesar 86,40.

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 7
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
3.	Indeks Pembangunan Gender	90,43	91,25	86,40

Sumber Data : DPPPAKB Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator indeks pembangunan gender, sebagai berikut:
 - **Faktor Pendukung Keberhasilan :**
 - 1) Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk akses kontrasepsi dan layanan persalinan;
 - 2) Pengurangan angka kematian ibu melalui program kesehatan berbasis komunitas dan fasilitas kesehatan yang lebih merata;
 - 3) Peningkatan Akses Pendidikan bagi Perempuan;
 - 4) Memberikan bantuan pendidikan bagi anak- anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak perempuan;
 - 5) Membantu perempuan dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) untuk mengakses pendidikan tinggi;
 - 6) Fokus pada kesehatan ibu hamil, persalinan aman, dan gizi anak;
 - 7) Memberikan pelatihan dan akses modal bagi perempuan wirausaha;

8) Meningkatkan keterampilan ekonomi perempuan dalam keluarga peserta KB.

- **Faktor Penghambat :**

- 1) Ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyebabkan sebagian perempuan masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan;
- 2) Kurangnya tenaga medis yang sensitif gender dalam menangani isu kesehatan perempuan;
- 3) Digitalisasi layanan kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil;
- 4) Gizi buruk pada perempuan dan anak, yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif;
- 5) Tingkat kematian ibu yang masih tinggi, akibat kurangnya akses terhadap layanan persalinan yang aman.

• **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan indeks pembangunan gender, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan formal;
- 2) Mengurangi angka putus sekolah pada anak perempuan akibat faktor ekonomi atau budaya;
- 3) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- 4) Meningkatkan kesadaran perempuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi;
- 5) Meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan;
- 6) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi formal dan informal.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator indeks pembangunan gender, sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung :
 - Adanya kebijakan yang mengakomodasi kesetaraan gender, seperti undang-undang perlindungan perempuan dan anak, serta kebijakan afirmatif dalam berbagai sektor;
 - Implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
 - 2) Pendidikan yang Inklusif dan Setara :
 - Akses pendidikan yang merata bagi laki-laki dan perempuan meningkatkan kesempatan ekonomi dan sosial;
 - Kurikulum yang tidak bias gender serta mendukung kesetaraan peran dalam masyarakat.
 - 3) Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi :
 - Pemberian peluang ekonomi yang sama bagi laki-laki dan perempuan, termasuk akses terhadap pekerjaan, kewirausahaan, dan sumber daya ekonomi;
 - Program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, seperti akses terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan.

Gambar 3.23
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG



✚ **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-7 (tujuh) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Indikator 1) dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 350.000.000,- (100%), Dinas Tenaga Kerja (Indikator 2) dengan anggaran sebesar Rp. 957.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 957.000.000,- (100%) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Indikator 3) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000, terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 (100%). Maka jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ketujuh adalah sebesar Rp. 1.507.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.507.000.000,- (100%). Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 71,04%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-7 (tujuh) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7
Terhadap Target RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026
1.	Persentase Pemuda Terampil	48%	71,4%	6,66 %	61%	74%	87%
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,31%	65,97%	74,06%	73,1%	74,98%	76,91%
3.	Indeks Pembangunan Gender	80,26	86,40	91,25	90,43	90,52	90,61

Sumber Data : DISPORA, DISNAKER dan DPPPAKB Kab. Biak Numfor Tahun 2024

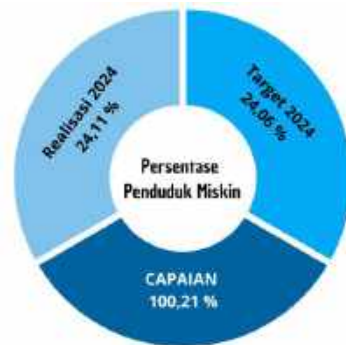
SASARAN 8
MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN DAYA SAING PEMUDA
DAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-8 (delapan) dengan 4 (empat) indikator adalah 115,47% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penduduk Miskin	24,06%	24,11%	100,21
2.	Gini Rasio	0,369	0,374	101,35
3.	Rasio Penduduk Ber-KTP	79,79%	86,45%	108,35
4.	Total Fertility Rate	25/1000 Perempuan	38/1000 Perempuan	152
Rata-Rata Capaian				115,47

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk Miskin merupakan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama, untuk mendapatkan realisasi indikator persentase penduduk miskin pada tahun 2024 adalah dengan rumus.



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2024}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2024}} \times 100 \% = \frac{35.688}{148.002} \times 100 \% = 24,11\%$$

Realisasi indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 24,11% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 24,06% dengan presentase capaian sebesar 100,21%. Realisasi indikator persentase penduduk miskin berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 8
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1.	Persentase Penduduk Miskin	24,06 %	24,11%	23,53%

Sumber Data : Dinas Sosial dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator persentase penduduk miskin, sebagai berikut:

- **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

- 1) Peningkatan Ketrampilan dan kemampuan masyarakat miskin ;
- 2) Tersedianya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, sosial ;
- 3) Penambahan anggaran untuk menekan angka kemiskinan ;
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM baik PNS maupun Non PNS ;
- 5) Tersedianya fasilitas pendukung dalam pelayanan kepada masyarakat.

- Meskipun telah mencapai target namun ada beberapa kendala yang menjadi **faktor penghambat** dalam hal penurunan Persentase Penduduk Miskin yakni :

- 1) Terbatasnya keterampilan dan kemampuan (*life skill*) masyarakat miskin;
- 2) Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik;
- 3) Perencanaan Kinerja dan penganggaran belum dilakukan secara baik dan optimal;
- 4) Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM untuk mendukung pencapaian penduduk miskin;
- 5) Terbatasnya ketersediaan anggaran.

• **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator persentase penduduk miskin, sebagai berikut :

- 1) Penguatan kapasitas dan kemampuan masyarakat miskin;

- 2) Kemudahan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik;
- 3) Koordinasi dan sinergitas lintas sektor ditingkatkan;
- 4) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;
- 5) Kapasitas SDM yang mampu.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Sosial telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator persentase penduduk miskin, sebagai berikut:
 - 1) Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (Kios Baja Ringan);
 - 2) Peningkatan kemampuan PSKS keluarga kewenangan kabupaten /kota (perbengkelan);
 - 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Jaminan hidup bagi lanjut usia);
 - 4) Pemberian Layanan Rujukan (ODGJ);
 - 5) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (BBR).

Gambar 3.24
Kegiatan Peningkatan kemampuan PSKS keluarga kewenangan kabupaten/kota (perbengkelan)



Gambar 3.25
Kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
(Kios Baja Ringan)



Gambar 3.26
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
(Jaminan hidup bagi lanjut usia)



Gambar 3.27
Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan (ODGJ)



Gambar 3.28
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (BBR)

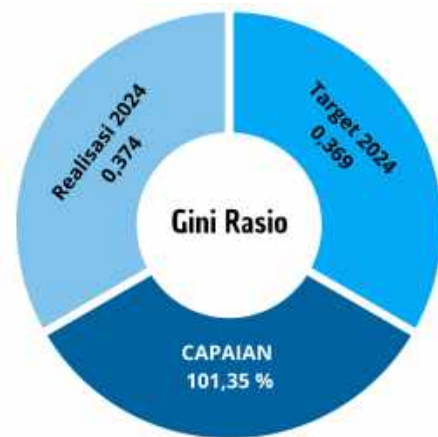


2. Gini Rasio

Cakupan indikator gini rasio merupakan indikator yang bersifat makro yang datanya berasal dari publish resmi data statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik, yang capaiannya merupakan kontribusi dari beberapa perangkat daerah sehingga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai *leading sector* yang mengakomodir data pembangunan daerah bertanggungjawab sebagai penyaji data.

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Capaian Realisasi indikator Gini Rasio Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 0,374 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 0,369 dengan presentase capaian sebesar 101,35 persen.



Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 8
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
2.	Gini Rasio	0,369	0,374	0,355

Sumber Data : BAPPEDA dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

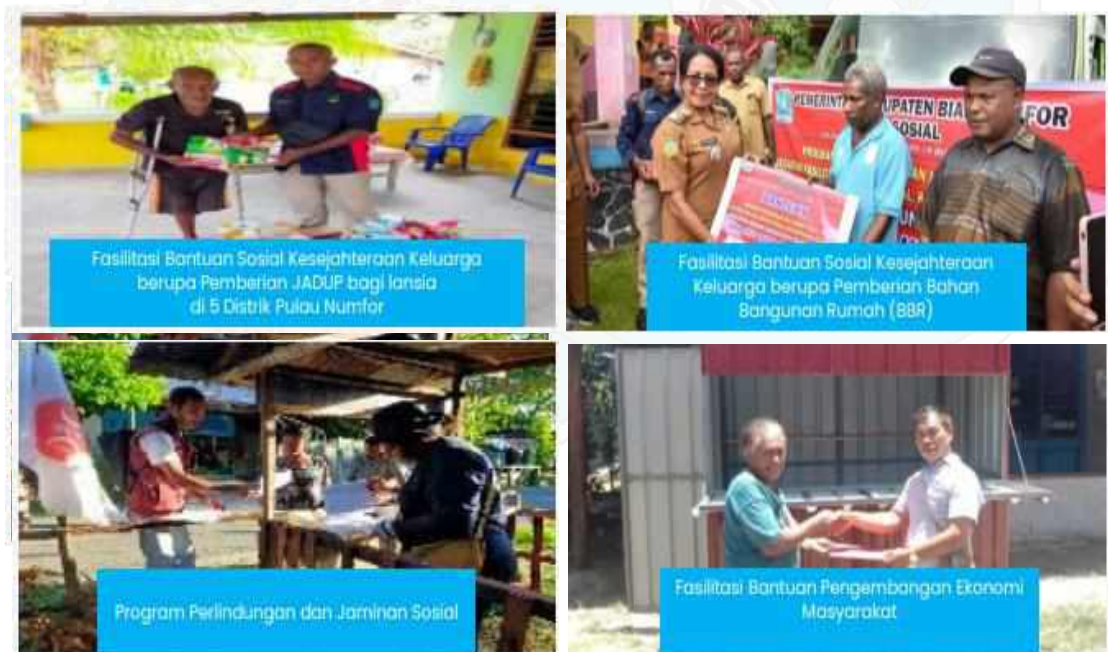
- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Gini Rasio, sebagai berikut:
 - **Faktor Pendukung Keberhasilan:**
 - 1) Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah tertinggal;
 - 2) Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau subsidi kebutuhan pokok untuk kelompok rentan;
 - 3) Mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, atau industri kreatif yang menyerap tenaga kerja;
 - 4) Upah minimum yang layak dalam artian menjamin upah sesuai kebutuhan hidup dan produktivitas pekerja;
 - 5) Kredit usaha mikro dengan bunga rendah, pendampingan bisnis, dan platform digital untuk pemasaran;
 - 6) Koperasi dan Ekonomi Gotong Royong dalam arti memperkuat kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya bersama;
 - 7) Membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal layak;
 - 8) Penggunaan data kemiskinan dan ketimpangan yang akurat untuk menyusun kebijakan.

- **Faktor penghambat** dalam hal penurunan Gini Rasio, yakni :
 - 1) APBD yang minim menghambat skala program;
 - 2) Inflasi dan krisis ekonomi global dapat memperburuk ketimpangan;
 - 3) Bantuan sosial (BLT, PKH) masih belum tepat sasaran karena data penerima tidak akurat;
 - 4) Tidak Ada Inovasi Pendapatan: Pemerintah daerah belum secara maksimal mengoptimalkan potensi pajak daerah atau aset publik;
 - 5) UMKM Kesulitan Akses Kredit. Bank enggan memberi pinjaman ke usaha mikro tanpa agunan;
 - 6) Perizinan masih tergolong lambat sehingga menghambat UMKM dan investor kecil untuk berkembang.

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Gini Rasio, sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan penduduk, dan menekan angka kemiskinan baik untuk penduduk wilayah perkotaan maupun pedesaan;
 - 2) Pajak progresif dan alokasi anggaran pro-rakyat miskin;
 - 3) Program pelatihan dan akses modal untuk UMKM/petani;
 - 4) Pembangunan infrastruktur inklusif diprioritas ke daerah tertinggal dan pedesaan.

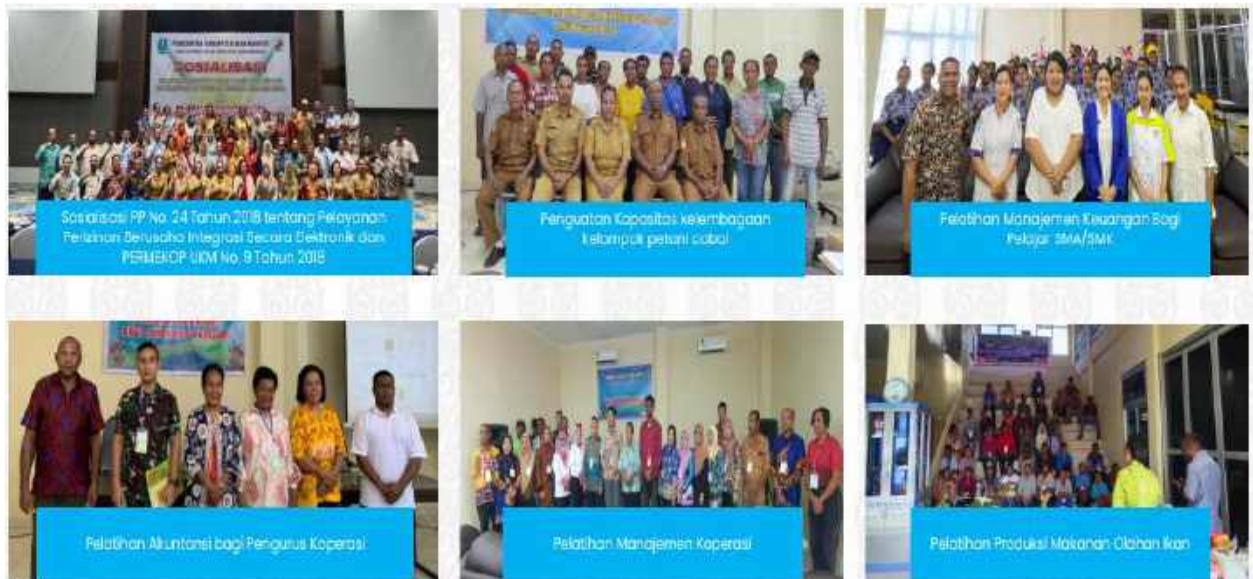
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui beberapa OPD terkait telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Gini Rasio, sebagai berikut:
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial);
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial);
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial);
 - 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja/LLK-UKM);
 - 5) Program Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja);
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (Dinas Koperasi dan UMKM).

Gambar 3.29
Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial



Gambar 3.30

Kegiatan Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM



3. Rasio Penduduk Ber KTP

Capaian indikator Rasio Penduduk Ber KTP dihitung menggunakan rumus formulasi jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dibagi jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah di kali 100 persen. Dimana jumlah



penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP berjumlah 88.363 orang, sedangkan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah berjumlah 102.202 orang. Sehingga realisasi indikator Rasio Penduduk Ber KTP tahun 2024 sebesar 86,45%, realisasi ini sudah memenuhi target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 79,79% dengan presentase capaian sebesar 108,35%.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jmlh Penduduk Usia } > 17 \text{ Tahun yg ber - KTP}}{\text{Jmlh Penduduk Usia } > 17 \text{ Tahun atau yg telah menikah}} \times 100\% \\ &= \frac{88.363 \text{ orang}}{102.202 \text{ orang}} \times 100\% = 86,45\% \end{aligned}$$

Realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 3,66 dari realisasi tahun 2023 sebesar 82,79%.

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam mencapai indikator Rasio Penduduk Ber KTP, sebagai berikut:
 - **Faktor Pendukung Keberhasilan :**
 - 1) Sumber Daya Manusia yang memadai;
 - 2) Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan administrasi kependudukan;
 - 3) Jangkauan layanan jemput bola;
 - 4) Adanya koordinasi dan Kerjasama dengan OPD teknis lainnya;
 - 5) Layanan Online.
 - **Faktor penghambat** dalam hal meningkatkan capaian indikator Rasio Penduduk Ber KTP, yakni :
 - 1) Anggaran yang terbatas;
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang tercukupi untuk pelayanan;
 - 3) Ruang kerja yang kurang memadai / kecil / tidak representatif ;
 - 4) Kepemilikan dokumen dasar Masyarakat yang kurang lengkap.

- Adapun upaya/solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Rasio Penduduk Ber KTP, sebagai berikut :
 - 1) Melakukan penambahan anggaran;
 - 2) Melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 3) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki;
 - 4) Upaya untuk menata kenyamanan ruang layanan;
 - 5) Meningkatkan layanan jemput bola dengan turun ke lapangan.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Rasio Penduduk Ber KTP, sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk;
 - 2) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - 3) Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - 4) Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting;
 - 5) Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 8
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
3.	Rasio Penduduk Ber KTP	79,79 %	86,45%	82,79%

Sumber Data : Dinas DUKCAPIL Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Gambar 3.31
Kegiatan Layanan Jemput Bola



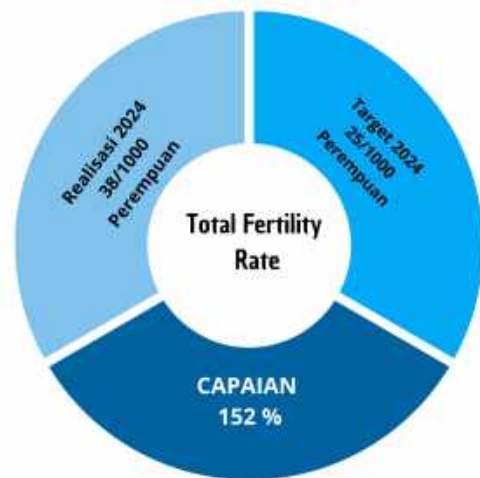
Gambar 3.32
Kegiatan Pelayanan ADMINDUK



4. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Fertilitas Total adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya — (biasanya usia 15–49 tahun) dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran spesifik usia

(Age-Specific Fertility Rate/ASFR) tetap konstan. TFR merupakan indikator penting dalam demografi karena mencerminkan tingkat kesuburan suatu populasi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara.



Data realisasi TFR tahun 2024 didapat dilakukan dari sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS), BPS biasanya merilis laporan TFR berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) atau Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyediakan data terkait fertilitas dan program kependudukan di Indonesia. Organisasi Internasional Seperti World Bank, United Nations (UN), dan WHO sering mempublikasikan data fertilitas global yang menggunakan Data Survei dan Sensus TFR dihitung berdasarkan data survei seperti SDKI yang mencatat angka kelahiran per kelompok usia perempuan. Data sensus juga dapat memberikan gambaran tentang pola fertilitas jika tersedia, menggunakan rumus perhitungan TFR di mana ASFR adalah angka kelahiran spesifik per kelompok umur perempuan dalam rentang usia 15–49 tahun.

Realisasi indikator Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 38/1000 perempuan dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 25/1000 perempuan dengan presentase capaian sebesar 152%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 lebih rendah realisasi TFR sebesar 20/1000 perempuan.

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4 Sasaran 8
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
4.	Total Fertility Rate	25/1000 Perempuan	38/1000 Perempuan	20/1000 Perempuan

Sumber Data : DPPPAB Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Total Fertility Rate(TFR), sebagai berikut:
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Peningkatan akses terhadap layanan Keluarga Berencana (KB), termasuk kontrasepsi gratis/subsidi;
 - 2) Penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - 3) Penyuluhan kesehatan reproduksi yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengaturan kelahiran;
 - 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran;
 - 5) Penyediaan alat kontrasepsi gratis melalui Posyandu dan Puskesmas;
 - 6) Mengedukasi laki-laki untuk turut serta dalam penggunaan kontrasepsi, seperti vasektomi;
 - 7) Memberikan pemahaman tentang kehamilan dan kontrasepsi bagi remaja;

- 8) Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini, melalui kebijakan minimum usia pernikahan (UU No. 16 Tahun 2019);
- 9) Menyediakan layanan konseling bagi remaja tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.

- Faktor Penghambat :

- 1) Ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan;
 - 2) Keterbatasan tenaga medis yang terlatih dalam layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil;
 - 3) Digitalisasi layanan kesehatan reproduksi, seperti konsultasi KB online dan aplikasi mobile.
 - 4) Distribusi alat kontrasepsi yang lebih merata, terutama di daerah tertinggal dan pedalaman.
 - 5) Kurangnya pemahaman tentang kontrasepsi, masih ada mitos atau ketakutan terkait penggunaan alat kontrasepsi yang menyebabkan rendahnya penggunaannya.
- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan Total Fertility Rate (TFR), sebagai berikut :
 - 1) Penurunan angka kelahiran karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya KB;
 - 2) Akses alat kontrasepsi lebih luas, termasuk bagi keluarga kurang mampu;
 - 3) Mengurangi angka kehamilan usia remaja yang berkontribusi terhadap tingginya TFR;
 - 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan dan kehamilan dini;

5) Perubahan norma sosial terhadap keluarga kecil, Kampanye dua anak cukup dan kesadaran akan pentingnya keluarga kecil dapat menurunkan TFR.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Total Fertility Rate(TFR), sebagai berikut:

1) Akses Terhadap Kontrasepsi dan Program Keluarga Berencana :

- Ketersediaan alat kontrasepsi yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Program keluarga berencana (KB) yang efektif dan berkelanjutan, termasuk penyuluhan tentang metode kontrasepsi;
- Dukungan pemerintah dalam menyediakan layanan KB secara gratis atau dengan biaya terjangkau.

2) Peningkatan Pendidikan, Terutama bagi Perempuan :

- Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar kesadaran mereka tentang kesehatan reproduksi dan manfaat memiliki keluarga kecil;
- Pendidikan juga meningkatkan peluang kerja perempuan, yang secara tidak langsung mengurangi angka kelahiran karena fokus pada karier dan kesejahteraan ekonomi.

3) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik mengurangi angka kematian bayi, sehingga keluarga tidak merasa perlu memiliki banyak anak sebagai "jaminan".

Gambar 3.33
Pelayanan Kesehatan bagi Ibu-Ibu Mengandung dan Pemberian Vitamin dan Gizi bagi Anak.



- ✚ **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-8 (delapan) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Indikator 1) dengan anggaran sebesar Rp. 5.109.080.600,- terealisasi sebesar Rp. 5.051.146.402,- (99%), OPD terkait (Indikator 2) dengan anggaran sebesar Rp. 7.087.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.087.000.000,- (100%), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Indikator 3) dengan anggaran sebesar Rp. 4.140.038.940,- terealisasi sebesar Rp. 4.066.247.715,- (98,21%) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Indikator 4) dengan anggaran sebesar Rp. 6.778.658.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.499.458.300,- (66,38%). Maka jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ke-8 (delapan) adalah sebesar Rp. 23.114.777.540- terealisasi sebesar Rp. 20.703.850.417,- (90%). Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 90% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 115,47%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-8 (delapan) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026
1.	Persentase Penduduk Miskin	24,48%	23,53%	24,11%	24,06 %	23,87%	23,69%
2.	Gini Rasio	0,374	0,355	0,374	0,369	0,366	0,364
3.	Rasio Penduduk Ber KTP	79,34%	82,79%	86,45%	79,79%	85,53%	93,26%
4.	Total Fertility Rate	25/1000 Perempuan	20/1000 Perempuan	38/1000 Perempuan	25/1000 Perempuan	20/1000 Perempuan	15/1000 Perempuan

Sumber Data : Dinas Sosial, BAPPEDA, Dinas DUKCAPIL dan DPPPAKB Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 9
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN DAN PARTISIPASI POLITIK

Sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan dan partisipasi politik masyarakat yang diukur dengan indikator Indeks Demokrasi tidak dapat dibandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2024 target untuk indikator Indeks Demokrasi sebesar 54,40. Sasaran ini juga tidak dapat



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya.



Berdasarkan data BPS Kabupaten Biak Numfor, PDRB Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebesar Rp. 6.557.125,7 dan PDRB sub kategori perikanan adalah sebesar Rp. 1.069.058,3 sehingga sektor perikanan memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 16,30%. Kontribusi sub sektor perikanan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 15,52% dengan capaian sebesar 105,02%.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jmlh Kontribusi PDRB Sektor Perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\% = \frac{1.069.058,3}{6.557.125,7} \times 100\% \\ &= 16,30\% \end{aligned}$$

Melihat capaian realisasi kinerja indikator kontribusi PDRB sektor perikanan tahun 2024 sebesar 16,30% mengalami penurunan sebesar 0,33 dari realisasi tahun 2023 sebesar 16,63%.

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	15,52%	16,30%	16,63%

Sumber Data : Dinas Perikanan dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB, antara lain :
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Masuknya investasi bidang perikanan;
 - 2) Meningkatnya pendapatan nelayan;
 - 3) Pertumbuhan investasi di bidang perikanan;
 - 4) Daya beli masyarakat yang cukup baik;
 - 5) Pemberian sarana perikanan guna menunjang produktifitas usaha UMKM bidang perikanan.
 - **Faktor Penghambat:**
 - 1) Tingginya modal usaha dalam pengembangan sektor perikanan;
 - 2) Terbatasnya akses modal usaha oleh perbankan;
 - 3) Terbatasnya akses pasar dalam maupun luar negeri;
 - 4) Dukungan perbankan bagi pelaku usaha perikanan yang masih kurang;
 - 5) Kurangnya promosi produk/hasil pelaku usaha perikanan ke luar.
- **Adapun upaya/Solusi** yang telah dilakukan dalam mencapai indikator kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB, sebagai berikut :
 - 1) Menarik dan mencari investasi guna pengembangan sektor perikanan;
 - 2) Meningkatkan produksi perikanan sektor industri dan UMKM;
 - 3) Meningkatkan pendapatan nelayan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan;
 - 4) Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha perikanan;
 - 5) Promosi dan pemasaran produk-produk perikanan.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perikanan telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB, sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - 2) Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - 3) Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 4) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Perikanan.

Gambar 3.34

Kegiatan Pengembangan Perikanan Tahun 2024



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-10 (sepuluh) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 15.667.697.468,- terealisasi sebesar Rp. 15.334.287.161,- (97,87%). Dengan realisasi anggaran sebesar 97,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,02%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-10 (sepuluh) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	16,21%	16,63%	16,30%	15,52%	15,59%	15,65%

Sumber Data : Dinas Perikanan dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 11
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAN PROMOSI WISATA

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-11 (sebelas) dengan 1 (satu) indikator adalah 40,75% dengan predikat kinerja “Sangat Rendah”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	4 Hari	1,63 Hari	40,75

Sasaran strategis Dinas Pariwisata tahun 2024 dengan target indikator kinerja rata-rata lama tinggal yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026 dan juga tertuang pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata adalah 4 (empat) hari, namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor rata-rata lama tinggal wisatawan adalah 1,63 hari. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan adalah sebesar 40,75%. Berikut adalah tabel rata-rata lama tinggal berdasarkan klasifikasi hotel.



Tabel 3.31

Rata-Rata Lama Tinggal Berdasarkan Klasifikasi Hotel

No	Kategori Hotel	Target 2024
1.	Hotel Bintang	1,66 Hari
2.	Hotel Non Bintang	1,45 Hari
Total		1,63 Hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Melihat capaian realisasi kinerja indikator rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2024 sebesar 1,63 hari mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar 1,82 hari, dari kedua periode tahun ini realisasi indikator rata-rata lama tinggal wisatawan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 4 hari.

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4 Hari	1,63 Hari	1,82 Hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja rata-rata lama tinggal wisatawan, sebagai berikut :
 - 1) Penetapan target pada RPJMD terlalu tinggi dan tidak disesuaikan dengan peluang pencapaian target. Secara nasional untuk Destinasi prioritas dan Kawasan sekitarnya target dan realisasi rata-rata lama tinggal paling tinggi hanya mencapai 3 hari dan secara moderat antara 2,5 - 3 hari;
 - 2) Lama tinggal wisatawan umumnya terjadi pada waktu tertentu dan untuk Kabupaten Biak Numfor sangat tergantung pada penyelenggaraan event, liburan sekolah dan liburan perayaan hari besar keagamaan (Lebaran dan Natal);
 - 3) Konektivitas laut terutama udara yang makin terbatas pada tahun 2024 memuat perjalanan wisata ke Biak menjadi terganggu dan mempengaruhi lama tinggal wisatawan karena harus memperhatikan / menyesuaikan dengan jadwal transportasi udara dan laut yang tidak tersedia setiap hari.

- **Alternatif solusi** yang harus dilakukan untuk mengatasi kegagalan dalam mencapai indikator rata-rata lama tinggal wisatawan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyesuaian kembali target indikator kinerja (rata-rata lama tinggal) yang lebih realistis;
 - 2) Perlu dilakukan promosi yang efektif , murah dan menarik terkait daya tarik wisatawan serta penyelenggaraan event yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor;
 - 3) Memastikan konektivitas dan aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Biak Numfor bisa setiap hari dengan harga yang relatif terjangkau;
 - 4) Mengoptimalkan paket wisata dan kolaborasi kuat serta saling menguntungkan bersama *stakeholder* utama yakni Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Travel Indonesia (ASITA) serta Pelaku Usaha dan Jasa Wisata lainnya termasuk memastikan dukungan Airline, Airport dan Aksesibilitas.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator rata-rata lama tinggal wisatawan, sebagai berikut:
 - 1) Program Pemasaran Pariwisata (Festival Biak Munara Wampasi, Festival Budaya dan Rally Yacht);
 - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, Pelatihan Pengelolaan Homestay dan Pelatihan Digitalisasi Branding, Pelatihan Kebersihan Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata, Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Wisata dan

Pelatihan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Wisata);

- 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Penataan Kawasan Wisata di Pantai Kasumasa Kampung Samau dan Pengembangan Destinasi Pariwisata di Obyek Wisata Air Terjun Wapsdori dan Napdori).

Gambar 3.35
Festival Biak Munara Wampasi 2024



Gambar 3.36
Festival Budaya Biak 2024



Gambar 3.37
Kegiatan Rally Yacht 2024



Gambar 3.38
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata



Gambar 3.39
Pelatihan Pengelolaan Homestay



Gambar 3.40
Pelatihan Digitalisasi Branding



- ✚ **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-11 (sebelas) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 29.637.941.035,- terealisasi sebesar Rp. 25.779.210.160,- (86,98%). Dengan realisasi anggaran sebesar 86,98% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 40,75%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-11 (sebelas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1,82 Hari	1,82 Hari	1,63 Hari	4 Hari	6 hari	7 hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 12
MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN EKSPANSI
PRODUKSI LOKAL

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-12 (dua belas) dengan 1 (satu) indikator adalah 92% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,5%	4,14%*	92

Ket : *) : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023.

Nilai Pertumbuhan PDRB pada Sektor Pertanian didapat dari BPS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh



seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ketahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Berdasarkan data dari BPS Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian tidak berdiri sendiri melainkan melekat didalamnya adalah Pertumbuhan PDRB untuk Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Maka dari itu untuk melihat pertumbuhan pada sektor pertanian maka digunakan konsep pendekatan produksi. Pendekatan produksi sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, dan sub sektor peternakan.

Capaian Realisasi untuk indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2024 dikarenakan sampai laporan dibuat data tersebut belum tersedia atau masih menunggu data yang akan dirilis oleh BPS Kabupaten Biak Numfor, sehingga untuk mengukur ketercapaian

indikator ini menggunakan realisasi tahun 2023 sebagai pembandingan dengan target tahun 2024.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,5%	N/A	4,14%

Ket : N/A) : Realisasi tahun 2024 belum ada/belum dirilis oleh BPS Kab.Biak Numfor.

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024.

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB, antara lain :
 - **Faktor Keberhasilan :**
Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
 - Meskipun terdapat faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi **faktor hambatan dan kendala** antara lain:
 - 1) Masih tingginya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian;
 - 2) Masih tingginya susut hasil komoditi pertanian; dan
 - 3) Belum terpenuhinya kebutuhan alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi.

- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-12 (dua belas) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.565.994.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.565.994.000,- (100%). Dengan realisasi anggaran sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-12 (dua belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,25%	4,14%	N/A	4,5%	4,57%	4,64%

Ket : N/A) : Realisasi tahun 2024 belum ada/belum dirilis oleh BPS Kab.Biak Numfor.

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024.

SASARAN 13
MENGUATNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING

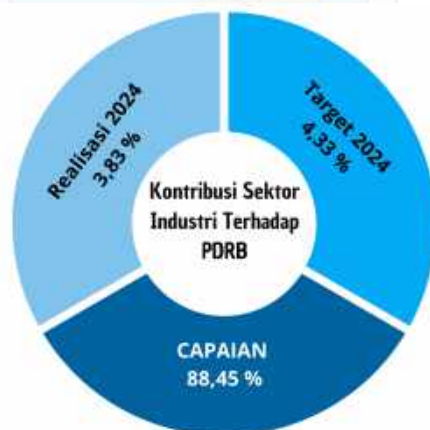
Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-13 (tiga belas) dengan 4 (empat) indikator adalah 71,67% dengan predikat kinerja “Sedang”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4,33%	3,83%	88,45
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,33%	18,01%	98,25
3.	Laju Inflasi	1,52%	N/A	-
4.	Persentase Pertumbuhan UMKM	20%	20%	100
Rata-Rata Capaian				71,67

Ket : N/A) : Realisasi Laju Inflasi belum dilakukan perhitungan oleh BPS Kab.Biak Numfor.

1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi PDRB merupakan bagian dari PDRB suatu daerah atau wilayah yang dihasilkan oleh suatu sektor atau industri tertentu. Kontribusi PDRB dinyatakan dalam persentase terhadap total PDRB, kontribusi PDRB sangat penting untuk



diketahui karena dapat membantu daerah atau wilayah untuk mengembangkan sektor atau industri yang potensial sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Nilai realisasi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 3,83% (sumber data BPS Kabupaten Biak Numfor).

Realisasi indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 3,83% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 4,33% dengan presentase capaian sebesar 88,45%. Jika

dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat peningkatan sebesar 0,02 dari realisasi tahun 2023 sebesar 3,81%.

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 13
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4,33%	3,83%	3,81%

Sumber Data : DISPERINDAG dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB, sebagai berikut:
 - **Faktor Pendukung Keberhasilan :**
 - 1) Terbangunnya Sarana Sentra Kerajinan Sabut Kelapa;
 - 2) Terlaksananya Program dan Kegiatan Pengadaan Mesin dan Peralatan yang di serahkan ke masyarakat guna meningkatkan kapasitas produksi;
 - 3) Terlaksananya Sistem Informasi Industri Nasional dalam pengumpulan dan pengolahan data Industri;
 - 4) Terfasilitasinya pelaku IKM dalam pengajuan Legalitas Usaha.
 - **Faktor penghambat :**
 - 1) Terbatasnya kemampuan Pelaku IKM dalam pengimputan laporan industri melalui SIINas;
 - 2) Kurangnya manajemen usaha dalam melakukan pemasaran produk IKM.

- Adapun upaya/solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB, sebagai berikut :
 - 1) Pendampingan proses produksi di Sentra dan di tempat produksi pelaku IKM;
 - 2) Pengawasan rutin/pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2);
 - 3) Pelatihan Teknis dan Manajerial bagi pelaku IKM;
 - 4) Fasilitasi peralatan bagi pelaku IKM.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB, sebagai berikut :
 - 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 2) Program Pengelolaan sistem Informasi Industri Nasional.

Gambar 3.42
Pelatihan Pengelolaan Bisnis Wirausaha bagi Pelaku IKM



Gambar 3.46
Pelatihan Anyaman dan Kerang Kerangan



2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sumbangan nilai tambah dari sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Kontribusi PDRB merupakan bagian dari PDRB suatu daerah atau wilayah yang dihasilkan oleh suatu sektor atau



Perdagangan tertentu. Kontribusi PDRB dinyatakan dalam persentase terhadap total PDRB, Kontribusi PDRB sangat penting untuk diketahui karena dapat membantu daerah atau wilayah untuk mengembangkan sektor Bidang Perdagangan yang potensial sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran sektor perdagangan sangat berpengaruh dalam kontribusi PDRB suatu daerah antara lain:

- Dapat memperlancar Distribusi arus barang dan jasa khususnya Bahan Pokok sebagai kebutuhan Dasar;
- Menjaga tingkat harga kebutuhan Pokok relatif stabil dan dapat dijangkau oleh Masyarakat;
- Sektor perdagangan berperan penting dalam perekonomian masyarakat, seperti memperlancar arus barang dan jasa, menjaga tingkat harga;
- Sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu Daerah.

Untuk Nilai realisasi Sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 18,01% (sumber data BPS Kabupaten Biak Numfor, realisasi indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 18,01% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 18,33% dengan presentase capaian sebesar 98,25%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar 0,38 dari realisasi tahun 2023 sebesar 18,39%.

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 13
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,33%	18,01%	18,39%

Sumber Data : DISPERINDAG dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam mencapai indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, sebagai berikut:
 - **Faktor Pendukung Keberhasilan :**
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di laksanakan di 14 Distrik yang tersebar di 23 Lokasi berbeda di kabupaten Biak Numfor, yang mana salah satu tujuan pelaksaan Operasi pasar murah yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan kenaikan harga yang menyebabkan terjadinya inflasi;
 - 2) Ketersediaan pasokan tetap mendapatkan perhatian agar menjamin ketersediaan Stock barang kebutuhan pokok.
 - **Faktor penghambat :**
 - 1) Sebagian besar pasokan Sembako di Kabupaten Biak Numfor masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur;
 - 2) Komoditas hortikultura seperti tomat, cabai, bawang, daging ayam ras cenderung memberi dampak inflasi, sebagian besar dimasukan dari luar Pulau Biak;
 - 3) Permasalahan yang dihadapi antara lain produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Biak Numfor yang di bawah nasional rendah sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.

- Adapun upaya/solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan pelaksanaan Operasi pasar murah menjadi Prioritas Utama di Kabupaten Biak Numfor;
 - 2) Menjaga stock pasokan Bahan Pokok selalu tersedia.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, sebagai berikut:
 - 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (pelaksanaan Operasi pasar murah dan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting);
 - 2) Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan (pemberian bantuan terhadap OAP).

Gambar 3.47
Pelaksanaan Operasi Pasar Murah





Gambar 3.48
Pemberian Bantuan Peralatan Payung Jualan



3. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Laju inflasi diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk menghitung laju inflasi suatu daerah dapat dihitung dengan rumus: Laju Inflasi = [(IHK periode ini - IHK periode sebelumnya) / IHK periode sebelumnya] x 100%. Indek Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat inflasi.



Untuk Kabupaten Biak Numfor, BPS Kabupaten Biak Numfor belum melakukan penghitungan Indikator tersebut secara mandiri, dan masih merujuk pada data Inflasi Provinsi Papua. Sehingga pada laporan ini tidak dapat dijabarkan analisis-analisis atas indikator laju inflasi.

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 13
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
3.	Laju Inflasi	1,52%	N/A	N/A

Ket : N/A) : Realisasi Laju Inflasi belum dilakukan perhitungan oleh BPS Kab.Biak Numfor.
Sumber Data : DISPERINDAG dan BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024

4. Persentase Pertumbuhan UMKM

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan, untuk mendapatkan pendapatan. UMKM memiliki kontribusi besar dan merupakan tulang punggung perekonomian, seperti menyerap tenaga kerja dan



- 2) Sumber daya manusia UMKM memiliki pengetahuan etika bisnis dan hukum sehingga tidak mudah untuk merugi;
- 3) UMKM sudah mandiri sehingga usahanya berkembang;
- 4) Banyak UMKM yang berminat tentang legalitas usaha (sertifikat halal);
- 5) Kemasan UMKM sdh sesuai standart;
- 6) Perhitungan masa simpan produk sudah dilakukan dengan benar sehingga sudah menetapkan tanggal kadaluarsa dengan akurat;
- 7) Besarnya kesadaran UMKM tentang legalitas formal usaha terkait ijin edar seperti halal dan yang lainnya;
- 8) Sudah memahami pentingnya manajemen keuangan, manajemen produksi dan manajemen pemasaran.

- **Faktor penghambat :**

- 1) Kurangnya kemampuan UMKM untuk masuk dipasar global;
- 2) Masih kurangnya bahan baku diwilayah Kabupaten Biak Numfor;
- 3) UMKM dalam pengetahuan tehnologi masih kurang sehingga tidak dapat membantu UMKM dalam mengembangkaproduk maupun pemasarannya;
- 4) Idealisme UMKM pada brandnya sendiri;
- 5) Kurangnya kesadaran UMKM akan pentingnya kelembagaan UMKM dalam membangun kepercayaan.

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Pertumbuhan UMKM, sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan akses pembiayaan,memberikan akses pembiayaan yang mudah, murah dan terjangkau seperti melalui kredit usaha rakyat;
 - 2) Pendampingan usaha , membantu UMKM mengelola pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usaha;
 - 3) Digitalisasi, memanfaatkan tehnologi digital untuk mempermudah akses informasi dan pengajuan KUR;
 - 4) Pengembangan pasar dan Promosi, memperluas jaringan pemasaran dan melakukan riset pasar;
 - 5) Peningkatan literasi keuangan dan manajemen, membantu UMKM mengelola keuangan dan mempertahankan stabilitas finansial;
 - 6) Pengembangan ketrampilan dan perilaku tenaga kerja, membantu UMKM memperbaiki kualitas SDM;
 - 7) Penguatan jaringan kemitraan, membangun kemitraan dengan sektor swasta,BUMN dan pemerintah daerah;
 - 8) Advokssi kebijakan pro UMKM, mendukung kebijakan yang mendukung UMKM;
 - 9) Pembangunan Infrastruktur, membangun infrastrutur berupa pasar untuk UMKM;
 - 10) Regulasi perlindungan usaha, memberikan perlindungan usaha dan regulasi yang jelas.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Persentase Pertumbuhan UMKM, sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik;
 - Peningkatan, pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - Sosialisasi, bimtek dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil dan menengah OAP untuk masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
- 2) Program Pembangunan Pengembangan UMKM dengan kegiatan mengembangkan usaha mikro.

Gambar 3.49
Pelatihan Komputer Bagi Pelaku UMKM dan koperasi



Gambar 3.50
Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Masuk Dalam Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa



Gambar 3.51
Kegiatan Pemberian Dana Hibah Bagi Para UMKM



- ✚ **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-13 (tiga belas) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indikator 1 s/d 3) dengan anggaran sebesar Rp. 18.402.188.622 terealisasi sebesar Rp. 17.919.085.393 (97,37%) dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Indikator 4) dengan anggaran sebesar Rp. 11.737.114.900,- terealisasi sebesar Rp. 11.737.114.900,- (100%). Maka jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ke-13

(tiga belas) adalah sebesar Rp. 30.139.303.522,- terealisasi sebesar Rp. 29.656.200.293,- (98,39%). Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 98,39% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 71,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-13 (tiga belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Target RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026
1.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4,04%	3,81%	3,83%	4,33%	4,41%	4,5%
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,47%	18,39%	18,01%	18,33%	18,41%	18,5%
3.	Laju Inflasi	N/A	N/A	N/A	1,52%	0,79%	0,41%
4.	Persentase Pertumbuhan UMKM	10%	15%	20%	20%	25%	30%

Ket : N/A) : Realisasi Laju Inflasi belum dilakukan perhitungan oleh BPS Kab.Biak Numfor.

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UMKM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 14
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-14 (empat belas) dengan 1 (satu) indikator adalah 70,86% dengan predikat kinerja “Sedang”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	65%	46,06%	70,86

Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan proporsi panjang total jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi baik atau sedang di suatu kabupaten dibandingkan dengan panjang total infrastruktur tersebut. Indikator ini bertujuan menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Cara mendapatkan realisasi tahun 2024, sebagai berikut :



- 1) Pengumpulan Data Lapangan :
 - Lakukan survei kondisi jalan dan jembatan di kabupaten menggunakan metode standar, seperti visual assesment atau teknologi seperti drone dan GIS.
 - Catat panjang jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.
- 2) Pengolahan Data :
 - Hitung total panjang jalan dan jembatan.
 - Identifikasi panjang jalan dan jembatan yang masuk kategori "mantap" (baik dan sedang). Gunakan rumus:

$$\text{Presentase Jalan Mantap} = \frac{\text{Panjang Jalan Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100\% = \frac{325.534}{706.787} \times 100\% = 46,06\%$$

3) Evaluasi dan Tindak Lanjut :

- Bandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
- Identifikasi kendala dan rencana perbaikan untuk meningkatkan persentase kemandapan.

Melihat capaian realisasi kinerja indikator persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2024 sebesar 46,06% dari target tahun 2024 sebesar 65% dengan persentase capaian sebesar 70,86%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi indikator persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap menurun sebesar 13,94 dari realisasi tahun 2023 sebesar 60%. Akan tetapi ada, penurunan panjang jalan di mana terjadi perubahan terhadap panjang jalan Kabupaten berdasarkan SK. Jalan di tahun 2014-2023 sepanjang 712,126 Km menjadi 706,787 Km pada SK Jalan tahun 2024 dan terjadi pengurangan Panjang jalan sebesar 3,59%.

Tabel 3.41
Panjang jalan status mantap, rusak sedang, dan rusak berat s/d tahun 2024

NO	STATUS JALAN	TAHUN			
		2023	2024		
			TARGET	REALISASI	SELISIH (+/-)
1	BAIK	247.79 KM	253.578 KM	34,8 %	-1,08 %
2	SEDANG	105.79 KM	71.956 KM	10,18 %	4,68 %
3	RUSAK RINGAN	104.26 KM	142.660 KM	-	-
4	RUSAK BERAT	254.30 KM	238.593 KM	-	-
	JUMLAH (Km)	712,126 KM	706.787 KM	36,06 %	- 3.59 %

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65%	46,06%	60%

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sebagai berikut :
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Komitmen SDM dalam pelaksanaan kegiatan melalui mengembangkan kompetensi pelatihan untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Perencanaan yang matang dan berbasis data sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai target.
 - 3) Tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), Juklak dan Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Kerja sama yang baik dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah dan masyarakat, sangat penting untuk kelancaran Pekerjaan;
 - 5) Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala membantu mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini;
 - 6) Kemajuan informasi dan teknologi;
 - 7) Tersedianya sarana dan prasarana cukup memadai;
 - 8) Dukungan sumber dana yang harus memadai.

- **Faktor Penghambat :**

- 1) Kegiatan fisik tersebut tidak dijalankan sesuai dengan mekanisme/peraturan yang berlaku;
- 2) Adanya gugatan hak ulayat lahan dari masyarakat, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- 3) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pelelangan;
- 4) Perubahan maupun penambahan kegiatan yang dilakukan di akhir tahun;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- 6) Keterbatasan material yang didatangkan dari luar daerah;
- 7) Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai dan penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- 8) Pendanaan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan keterlambatan atau penundaan proyek;
- 9) Kurangnya dukungan sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data yang akurat.

- **Solusi/Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan dalam mencapai indikator persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sebagai berikut :

- 1) Program/kegiatan harus berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak terjadi keterlambatan dalam proses yang telah direncanakan;

- 2) Harus selalu ada pendekatan Pemerintah kepada masyarakat, agar dapat memperlancar program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Perubahan atau penambahan kegiatan jangan dilakukan di akhir tahun, terutama kegiatan fisik yang tidak mungkin dilaksanakan di akhir akhir tahun;
- 4) Sebaiknya pelaksanaan tender kegiatan dilaksanakan pada awal tahun;
- 5) Harus selalu dilakukan pengecekan stok material sehingga dapat memenuhi kebutuhan;
- 6) Penempatan harus sesuai dengan bidang ilmu atau besik dasar pendidikan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan;
- 7) Penambahan tenaga ahli yang lebih berpengalaman dalam bidang teknis;
- 8) Penambahan sumber dana dalam menunjang program dan kegiatan.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas PUPR telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Sub sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- 2) Pembangunan Jalan;
- 3) Rekonstruksi/Peningkatan Jalan;
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan;
- 5) Pemeliharaan Rutin Jalan.

Gambar 3.52
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis
Ruas Jalan Pasi-Samber Pasi, Distrik Aimando



Gambar 3.53
Rekonstruksi/ peningkatan Jalan



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Diponegoro –
Distrik Biak Kota



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Selat Bali –
Distrik Biak Kota



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Selat Bangka –
Distrik Biak Kota



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Waderbo –
Opiaref – Distrik Oridek



Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Mokmer – Parai
-Biak kota



Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Sauri – Tanjung
Barari – Distrik Oridek



Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Darfuar – Sorido
– Biak Kota / Samofa



Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Sunyar –
Anyamdani – Distrik Yendidori



Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Lingkar Babrinbo
(Sorido Perumahan Guru) – Distrik Biak Kota



Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Taman Firdaus –
Distrik Samofa



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Lingkar Pemda Dalam (Akses Ke Yafdas) – Distrik Samofa



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Lingkar Snerbo - Kimnom - Distrik samofa



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Lingkar Pemda Dalam – Distrik Samofa



Rekontruksi Peningkatan Jalan Yenburwo-Mnggari – Numfor Timur



Rekontruksi/ Peningkatan Jalan Yenures Pantai – Distrk Biak Kota



Pemeliharaan Berkala / Rutin Jalan Wilayah Kota dan Sekitarnya – Distrik Samofa dan Biak Kota



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-14 (empat belas) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 53.174.332.482,- terealisasi sebesar Rp. 48.857.537.927,- (92%). Dengan realisasi anggaran sebesar 92% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 70,86%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-14 (empat belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	55%	60%	46,06%	65%	70%	75%

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 15
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-15 (lima belas) dengan 1 (satu) indikator adalah 100,54% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,52	79,95	100,54

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH digunakan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Berdasarkan Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029, penghitungan IKLH Kabupaten / Kota dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Dari hasil pengukuran, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 mencapai angka 79,95. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 79,52 dengan persentase capaian 100,54%, realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 (82,84) dan beberapa tahun sebelumnya menunjukkan penurunan. Keadaan ini disebabkan karena sampling air untuk Indeks Kualitas Air (IKA) yang menjadi salah satu komponen dalam IKLH pada tahun 2024 yang seharusnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, hal ini terjadi dikarenakan keterlambatan pencairan dana untuk pengambilan sampling dan uji sampling air sehingga batas waktu input hasil uji sampling terlewat.

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,52	79,95	82,84

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sebagai berikut :
 - 1) Adanya perbaikan kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
 - 2) Adanya upaya pengendalian pencemaran air limbah industri dan domestik yang lebih ketat;
 - 3) Adanya upaya pelestarian hutan dan pengurangan deforestasi.

- 4) Tidak membuang sampah sembarangan, limbah industri, dan menebang hutan secara liar.
- 5) Peningkatan IKLH sejalan dengan peningkatan persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- 6) Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat ditangani / terkelola di Kabupaten Biak Numfor.

- **Solusi/Upaya** yang dilakukan untuk mencapai indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kualitas Udara, yaitu dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan teknologi pengendalian polusi, meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan;
- 2) Indikator Kualitas Air, dapat dilakukan dengan cara mengurangi pencemaran air, meningkatkan penggunaan air bersih, mengimplementasikan sistem pengelolaan air yang efektif;
- 3) Indikator Kualitas Tanah, dengan cara mengurangi pencemaran tanah, meningkatkan penggunaan lahan yang efektif dan mengimplementasikan sistem pengelolaan tanah yang efektif;
- 4) Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efektif;
- 5) Peningkatkan kualitas SDM dan penganggaran yang proporsional.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 2 (dua) kegiatan :
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten.

Gambar 3.55
Kegiatan Pengambilan Sampel Air di beberapa Titik Lokasi Pemantauan untuk Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ; Indeks Kualitas Air (IKA)



Gambar 3.56
Kegiatan Pemasangan Passive Sampler Pengambilan Sampel Udara di beberapa Titik Lokasi Pemantauan untuk Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ; Indeks Kualitas Udara (IKU)



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-15 (lima belas) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 219.427.000,- terealisasi sebesar Rp. 219.427.000,- (100%). Dengan realisasi anggaran sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,54%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-15 (lima belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,37	82,84	79,95	79,52	79,76	80

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 16
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-16 (enam belas) dengan 1 (satu) indikator adalah 83,33% dengan predikat kinerja “Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Layanan Transportasi	60%	50%	83,33

Cakupan layanan transportasi adalah wilayah yang terjangkau oleh layanan transportasi, mulai dari pergerakan manusia (angkutan penumpang) dan barang (angkutan barang), serta layanan transportasi publik dan swasta yang beroperasi di berbagai jenis infrastruktur seperti jalan, reel, air dan udara serta melayani rute lokal, regional dan internasional. Untuk Kabupaten Biak Numfor, cakupan layanan transportasi meliputi layanan angkutan penumpang dan barang yang menggunakan angkutan darat laut dan udara dengan jenis infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan terminal yang melayani rute lokal dan regional. Manfaat layanan transportasi bagi masyarakat adalah memfasilitasi pergerakan penduduk, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, keamanan dan kenyamanan.



Capaian Realisasi indikator kinerja cakupan layanan transportasi tahun 2024 sebesar 50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 60% dengan presentase capaian sebesar 83,33%. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 28,5% dari realisasi tahun 2023 (21,5%).

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Cakupan Layanan Transportasi	60%	50%	21,5%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja cakupan layanan transportasi, sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai serta pemeliharaan akan prasarana perhubungan;
- 2) Terbatasnya / masih rendahnya SDM perhubungan yang berkualitas;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas;
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga fasilitas lalu lintas yang sudah terpasang / terbangun.

- **Solusi/Upaya** yang dilakukan untuk mencapai indikator cakupan layanan transportasi, adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan pengadaan dan perawatan fasilitas terminal, pemeliharaan dermaga, rambu-rambu lalu lintas, LPJU melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- 2) Mengajukan pengusulan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan;
- 3) Berupaya Memberikan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat dan awak kendaraan umum pada setiap kesempatan pengawasan lapangan.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator cakupan layanan transportasi, sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Program Pengelolaan Pelayaran : Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Gambar 3.57
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pemasangan dan Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan (LPJU)



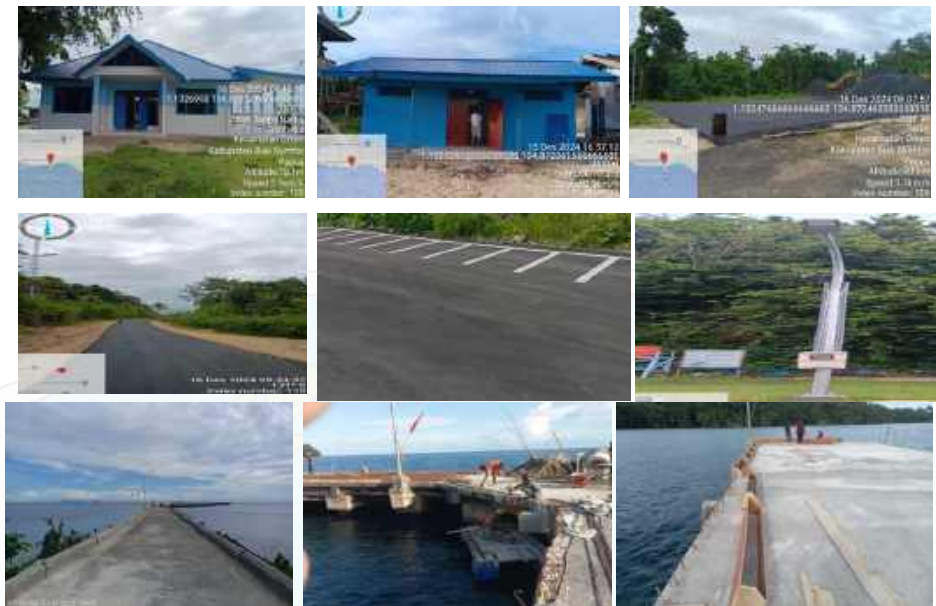
Gambar 3.58
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



Gambar 3.59
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pembangunan Dermaga Mini di Napdori Distrik Swandiwe)



Gambar 3.60
Rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal
(Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Saribi Numfor)



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-16 (enam belas) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.17.340.571.000,- terealisasi sebesar Rp.17.340.571.000,- (100%). Dengan realisasi anggaran sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 83,33%, penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-16 (enam belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Cakupan Layanan Transportasi	21,5%	21,5%	50%	60%	65%	70%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 17
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-17 (tujuh belas) dengan 1 (satu) indikator adalah 83,73% dengan predikat kinerja “Tinggi”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Layanan Telekomunikasi	80%	66,99%	83,73

Cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 terealisasi sebesar 66,99% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 83,73%, realisasi kinerja tahun 2024 masih sama dengan realisasi kinerja tahun 2023 (66,99%). Hal ini dikarenakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tidak mengelola dana yang cukup untuk pengembangan jaringan telekomunikasi, pada tahun 2023 dan tahun 2024 Kabupaten Biak Numfor



mendapatkan bantuan jaringan telekomunikasi melalui Bakti Kominfo yang tersebar di 17 (tujuh belas) Distrik selain Distrik Biak Kota dan Samofa.

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi	80%	66,99%	66,99%

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi adalah tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan jaringan telekomunikasi.
- **Solusi/Upaya** yang dilakukan untuk mencapai indikator cakupan layanan telekomunikasi, adalah sebagai berikut :
 - 1) Menganggarkan dana untuk pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - 2) Usulan penambahan jaringan telekomunikasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Usulan penambahan jaringan telekomunikasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan beberapa program/kegiatan guna memenuhi target indikator cakupan layanan telekomunikasi, adalah dengan penambahan jaringan telekomunikasi.

Gambar 3.61
Penambahan Jaringan Telekomunikasi



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-17 (tujuh belas) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 915.097.300,- terealisasi sebesar Rp. 915.094.998,- (99,99%). Dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 83,73%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-17 (tujuh belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Cakupan Layanan Telekomunikasi	58%	66,99%	66,99%	80%	90%	100%

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber Data : BPBD Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja Indeks Resiko Bencana, sebagai berikut :
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/peran serta Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - 2) Penanggulangan bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini;
 - 4) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta Pemerintah, relawan dan Pemerintah kampung serta masyarakat.
 - **Faktor Penghambat :**
 - 1) Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana;
 - 2) Masih adanya warga yang berada pada daerah rawan bencana yang belum memahami tentang penanggulangan bencana;
 - 3) Ketergantungan masyarakat pada pemerintah masih tinggi dalam pendanaan kegiatan.

- **Alternatif Solusi/Upaya** yang dilakukan untuk mencapai indikator Indeks Resiko Bencana, adalah sebagai berikut :
 - 1) Telah disahkan dan dilegalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebakaran;
 - 2) Memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis bencana yang rawan terjadi di daerah;
 - 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
 - 4) Menimimalisir dampak negative bencana alam;
 - 5) Meningkatkan peran aktif pemerintah bersama dunia usaha dengan melibatkan masyarakat, akademis, dan media massa sehingga terbentuk sinergitas dalam upaya penanggulangan bencana.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Indeks Resiko Bencana, sebagai berikut :
 - 1) Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota.

Gambar 3.62

Sosialisasi, Informasi, dan Edukasi rawan Bencana di Distrik Bondifuar Kab. Biak Numfor Tahun 2024



Gambar 3.63
Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana di Distrik Swandiwe Kab. Biak Numfor Tahun 2024



Gambar 3.64
Penyusunan Standar Operasional Penanggulangan Bencana Alam dan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kab. Biak Numfor Tahun 2024



Gambar 3.65
Pelatihan Konselor dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana di Kab. Biak Numfor Tahun 2024



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-18 (delapan belas) yang dilaksanakan oleh BPBD dengan anggaran sebesar Rp. 6.504.081.514,- terealisasi sebesar Rp. 3.784.171.075,- (58,18%). Dengan realisasi anggaran sebesar 58,18% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-18 (delapan belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.51
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Indeks Resiko Bencana	sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber Data : BPBD Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 19
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-19 (sembilan belas) dengan 5 (lima) indikator adalah 105.58% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Desa Membangun	0,5885	0,5797	98,50
2.	Nilai AKIP	62,68	54,27	86,58
3.	Indeks Merit Sistem	0,41	0,41	100
4.	Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	7	10	142,85
5.	Opini BPK	WTP	WTP*	100
Rata-Rata Capaian				105,58

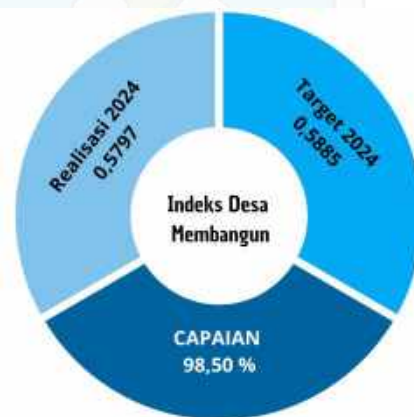
Ket : *) : Realisasi Opini BPK menggunakan realisasi tahun 2023.

1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. IDM dapat menentukan status desa menjadi desa mandiri, maju,

berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal berdasarkan nilai indeks-indeks tersebut. Indeks Desa Membangun Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 16 kampung dengan predikat berkembang dari total 257 kampung dan yang dibiayai melalui Dana Desa sebanyak 254 kampung sedangkan 3 Kampung masih dibiaya dari APBD Kabupaten Biak Numfor, sehingga jumlah kampung dengan kategori membangun sebanyak 109 kampung pada tahun 2024.

Capaian realisasi indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 0,5797 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 0,5885



dengan presentase capaian sebesar 98,50%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat peningkatan sebesar 0,0088 dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,5709.

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 19
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1.	Indeks Desa Membangun	0,5885	0,5797	0,5709

Sumber Data : DPMK Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Indeks Desa Membangun, sebagai berikut:

- **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

- 1) Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam pemberdayaan Masyarakat guna pengetasan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Desa);
- 2) Peningkatan Kapasitas Baik ASN DPMK, Aparat Kampung dan Bamuskam melalui kegiatan Bimtek dan Studi Banding;
- 3) Perlunya peningkatan Saran dan Prasarana penunjang dalam mendukung aktifitas kinerja ASN DPMK Kabupaten Biak Numfor;
- 4) Peningkatan Anggaran pada DPMK Kabupaten Biak Numfor;
- 5) Soliditas internal yang baik dan alur komunikasi/ koordinasi/ konsultasi yang efektif.

- **Faktor penghambat :**

- 1) Masih kurangnya anggaran yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pada DPMK;
- 2) Kurangnya kegiatan Bimtek yang menambah peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang Kampung (Desa);
- 3) Tidak adanya sarana pendukung baik dalam Penunjang kegiatan sehari-hari;
- 4) Terbatasnya SDM yang mempunyai spesifikasi pemahaman tentang kampung (desa).

• **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Desa Membangun, sebagai berikut :

- 1) Tetap melakukan koordinasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Desa);
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan Sosialisasi terhadap Tugas dan Fungsi Aparat Kampung dan Bamuskan;
- 3) Mengawasi dan Mengarahkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Kelembagaan Kampung (desa);
- 4) Evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

• Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Indeks Desa Membangun, sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Monitoring Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) Pembinaan dan Pemberdayaan BumDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa;

- 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yaitu Dewan Adat Byak dan Lambaga Masyarakat adat;
- 5) Indentifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- 6) Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Keluarga.

Gambar 3.66
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Kepala kampung dan Bendahara Kampung Se-Distrik Biak Kota Tahun 2024



Gambar 3.67
Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa



Gambar 3.68

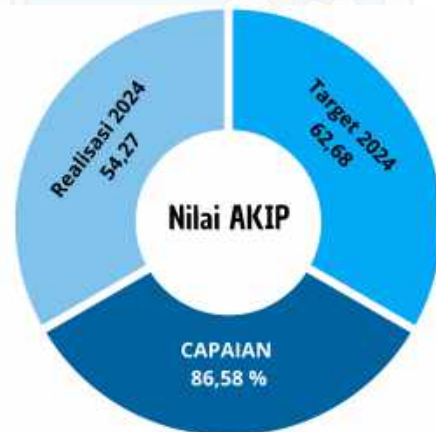
Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat



2. Nilai AKIP

Berdasarkan Surat KEMENPAN RB Nomor: B/542/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh nilai

sebesar 54,27 dengan predikat "CC". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP Kabupaten Biak Numfor sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 3.53

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	16,34	16,64
b. Pengukuran Kinerja	30	12,96	13,46
c. Pelaporan Kinerja	15	8,04	9,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,71	15,03
Nilai Hasil Evaluasi	100	52,05	54,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber : KEMENPANRB Tahun 2024

Realisasi tahun 2024 untuk indikator Nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor adalah 54,27 dari target tahun 2024 yang ditetapkan adalah 62,68 dengan presentase capaian kinerja sebesar 86,58%. Realisasi kinerja tahun 2024 belum mencapai target namun mendapatkan peningkatan nilai sebesar 2,22 dari Nilai AKIP Tahun 2023, dimana Nilai AKIP Tahun 2023 adalah 52,05. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan capaian nilai AKIP terus menjadi lebih baik.

Tabel 3.54

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2
Sasaran 19 Tahun 2024 dan 2023**

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
2.	Nilai AKIP	62,68	54,27	52,05

Sumber Data : Tim SAKIP Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Nilai AKIP, sebagai berikut:
 - **Faktor Keberhasilan :**
 - 1) Adanya komitmen yang baik dari Pimpinan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan Nilai AKIP Kabupaten;

- 2) Adanya koordinasi yang baik antara TIM SAKIP Kabupaten dan PD dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen-dokumen SAKIP;
- 3) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dokumen perencanaan kinerja RPD 2024-2026 yang telah dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja serta dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah (PD);
- 4) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah tepat waktu;
- 5) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melakukan evaluasi internal atas impelentasi SAKIP di seluruh PD;
- 6) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Pedoman Evaluasi Internal sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, namun masih berupa draft dan belum disahkan.

- Faktor penghambat :

- 1) Masih adanya ketidakselarasan perencanaan kinerja antara Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) khususnya dalam penetapan sasaran strategis;
- 2) Masih terdapat indikator pada RPD maupun Renstra PD yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup mengukur kinerja yang diharapkan;
- 3) Masih terdapat unit kerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum cukup mencerminkan kinerja yang diharapkan;
- 4) Masih terdapat formulasi indikator pada IKU level PEMDA dan Perangkat Daerah yang belum relevan

dalam mengukur kinerja yang diharapkan dan belum spesifik menjelaskan definisi operasionalnya;

- 5) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum menetapkan pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja, sehingga belum dapat dipastikan keandalan dari data kinerja yang diperoleh;
- 6) Laporan hasil evaluasi internal belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap PD dalam implementasi SAKIP;
- 7) Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang baku untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Dengan demikian, perbaikan kualitas implementasi AKIP belum dapat dipastikan merata dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.

- **Upaya/Solusi** yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan Nilai AKIP Kabupaten di Tahun 2024 adalah dengan menindak lanjuti rekomendasi dari KEMENPANRB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor B/624/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.55
Tindak Lanjut Rekomendasi LHE KEMENPANRB Tahun 2023

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<p>1. Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja di level Pemda dengan cara memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan ke PK sesuai dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPJMD sehingga perencanaan kinerja di level Pemda lebih berkualitas.</p>	<p>Melaksanakan rapat evaluasi internal Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja dengan memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan pada PK level Pemda selaras dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPD.</p>
<p>2. Membuat pohon kinerja dengan yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan/ cascading kinerja, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan critical success factor (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja. Selanjutnya pohon kinerja dituangkan kedalam dokumen perencanaan, sehingga akan terdapat keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik.</p>	<p>Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah dan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun pohon kinerja</p>
<p>3. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada level Pemda dan PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan <i>Zoom Meeting</i> perbaikan dokumen SAKIP kepada seluruh perangkat daerah. • Melaksanakan kegiatan <i>Coaching Clinic</i> dokumen SAKIP kepada seluruh perangkat daerah.

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<p>kriteria spesifik, relevan, dan terukur.</p>	
<p>4. Mengunggah LPPD dan Laporan Kinerja PD kedalam aplikasi esr.menpan.go.id maupun website milik Pemda maupun PD sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah mengunggah dokumen LPPD dan Laporan Kinerja PD kedalam aplikasi esr.menpan.go.id. • Telah mempublikasikan dokumen SAKIP seperti RENSTRA, PK, LKIP, dan lain-lain pada website resmi Kabupaten Biak Numfor dan website resmi masing-masing perangkat daerah, dan dapat diakses oleh masyarakat.
<p>5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan benchmark dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun LKIP Kabupaten telah menyusun laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja. • Telah disusun Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
<p>6. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun Laporan Kinerja PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;</p>	<p>Informasi kinerja yang ada dalam LPPD dan Laporan Kinerja digunakan sebagai salah satu sumber penyusunan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dan juga dokumen-dokumen perencanaan lainnya.</p>

Rekomendasi	Tindak Lanjut
7. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;	Telah disusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.
8. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;	Temuan dan Rekomendasi yang diberikan akan dituangkan dalam catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal instansi pemerintah.
9. Mendorong adanya kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD.	Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal SAKIP terhadap 30 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan pemberian reward berupa plakat penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan punishment berupa plakat bergilir bagi peringkat terakhir evaluasi internal AKIP yang dilaksanakan pada apel gabungan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 02 September 2024 bertempat pada halaman kantor Bupati Biak Numfor.

Sumber : Tim SAKIP Kab.Biak Numfor Tahun 2024

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian organisasi Setda telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Nilai AKIP, sebagai berikut:
 - 1) Rapat evaluasi internal Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor (Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, serta

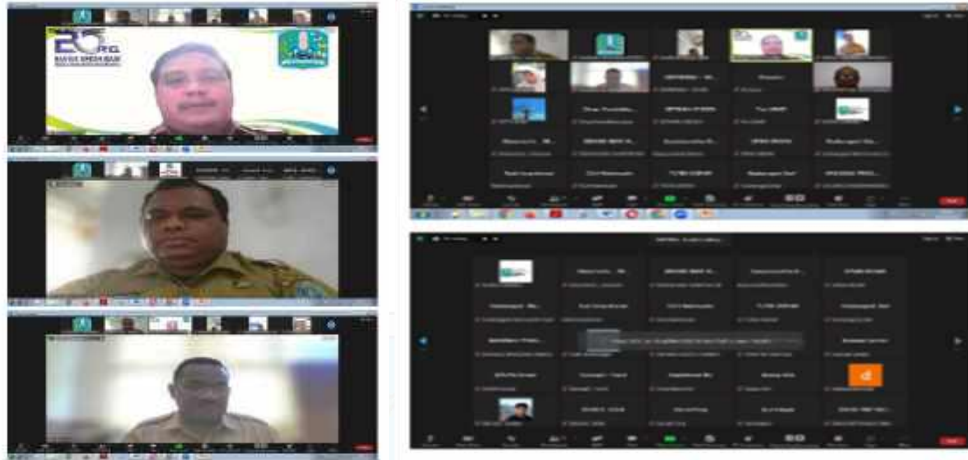
BKPSDM) dalam membahas Rekomendasi LHE Tahun 2023;

- 2) Melaksanakan Zoom Meeting dalam asistensi perbaikan dokumen SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah;
- 3) Pertemuan Tim SAKIP Kabupaten (Bagian Organisasi) bersama Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan LKIP Kabupaten Tahun 2023;
- 4) Melaksanakan Coaching Clinic Dokumen SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah.
- 5) Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sebagai Pendukung Kelengkapan Dokumen SAKIP Kab. Biak Numfor;
- 6) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan pemberian reward berupa plakat penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan punishment berupa plakat bergilir bagi peringkat terakhir, berdasarkan Hasil Evaluasi Internal SAKIP terhadap 30 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Gambar 3.69
Rapat Evaluasi Internal TIM SAKIP Kabupaten



Gambar 3.70
Zoom Meeting Asisten Dokumen SAKIP



Gambar 3.71
Coaching Clinic Dokumen SAKIP



Gambar 3.72
Pertemuan Tim SAKIP Kabupaten (Bagian Organisasi)
bersama Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan LKIP Tahun 2023



Gambar 3.73
Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah dan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun pohon kinerja



Gambar 3.74
Pemberian Reward berupa Plakat Penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan Punishment berupa Plakat Bergilir bagi OPD Peringkat Terakhir di Lingkungan Pemerintahan Kab. Biak Numfor



3. Indeks Merit Sistem

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen yang didasarkan pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi sementara Indeks merit system adalah penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi



perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, kinerja, disiplin dan penghargaan, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi dimana setiap tahunnya dilaporkan berupa dokumen serta bukti-bukti proses pelayanan melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dalam naungan KASN (komisi Aparatur Sipil Negara) yang berwenang menilai sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Capaian realisasi indikator Indeks Merit Sistem Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 mencapai 0,41 dan telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 0,41 dengan presentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat peningkatan sebesar 0,01 dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,4.

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 19
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
3.	Indeks Merit Sistem	0,41	0,41	0,4

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Indeks Merit Sistem, sebagai berikut:
 - **Faktor Pendukung Keberhasilan :**
 - 1) Pelayanan yang dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Sistem informasi yang mendukung semua proses pelayan manajemen kepegawaian.
 - **Faktor penghambat :** Kurangnya peraturan daerah dalam penerapan kebijakan beberapa aspek merit sistem.
- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Merit Sistem, dengan akan di upayakan adaya rancangan peraturan daerah untuk penerapan kebijakan beberapa aspek merit sistem.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Indeks Merit Sistem, sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan ASN yakni PNS dan PPPK;
 - 2) Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Jabatan Fungsional Lainnya.

Gambar 3.75
Kegiatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Jabatan Fungsional Lainnya dan pengaduan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor



4. Jumlah PERDA Yang Dihasilkan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Perda merupakan salah satu produk hukum daerah, fungsi Perda Kabupaten sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan nasional, sebagai sarana hukum untuk memperhatikan ciri khas daerah, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pada tahun 2024 target indikator jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan adalah 7 (tujuh) dan terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) Perda yang ditetapkan/dihasilkan dengan presentase capaian kinerja sebesar 142,85%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat peningkatan sebanyak 4 (empat) Perda yang ditetapkan/dihasilkan dimana realisasi tahun 2023 sebanyak 6 (enam) Perda.



Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4 Sasaran 19
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
4.	Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	7	10	6

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024.

- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator jumlah PERDA yang dihasilkan, sebagai berikut:

- **Faktor Keberhasilan :**

- 1) Seluruh rancangan produk hukum yang ditetapkan telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berlaku;
- 2) Adanya sinergi yang baik dan selaras;
- 3) Adanya sumber daya aparatur yang berkompeten;
- 4) Adanya fasilitasi dalam penyusunan produk hukum yang memadai;
- 5) Tingkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait yang efektif.

- **Faktor penghambat :**

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dan proses;
- 2) Anggaran yang tidak mencukupi/memadai untuk memfasilitasi penyusunan produk hukum;
- 3) Adanya penyesuaian penyusunan produk hukum daerah disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi;
- 4) Proses pemberian Nomor Register Perda Oleh Biro Hukum Provinsi Papua di sesuaikan dengan regulasi dan materi matang.

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator jumlah PERDA yang dihasilkan, sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan produk hukum yang harmonis, dengan tetap melaksanakan proses harmonisasi kepada lembaga yang berwenang;

- 2) Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum daerah kepada petugas penyusun produk hukum;
 - 3) Efisiensi anggaran yang memadai dalam fasilitasi penyusunan produk hukum.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Hukum Setda telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator jumlah PERDA yang dihasilkan, sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan RAPERDA OPD Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Biak Numfor;
 - 2) Melaksanakan koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2024 antaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor bersama Biro Hukum Provinsi Papua;
 - 3) Rapat Singkronisasi muataan materi evaluasi rancangan PERDA tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua, dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Gambar 3.76
Penyerahan RAPERDA Tahun 2024 kepada
DPRD Kabupaten Biak Numfor



Gambar 3.77
Koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2024
Pada Biro Hukum Provinsi Papua



Gambar 3.78
Rapat Singkronisasi Muatan Materi Evaluasi
Rancangan PERDAtentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Tahun 2023 Pemda Kab. Biak Numfor, Pemerintah
Provinsi Papua Dan Kementerian Dalam Negeri RI.



5. Opini BPK

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024 masih dalam tahap penyusunan dan masih dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, sehingga hasil atau pencapaiannya baru akan di peroleh setelah LKPD



diserahkan dan diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Namun diharapkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat memperoleh Predikat WTP untuk Opini BPK sesuai dengan target yang di tetapkan pada tahun 2024.

Perbandingan capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan realisasi tahun 2023, dimana pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor mendapatkan Predikat WTP. Sehingga capaian realisasi indikator Opini BPK Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 memperoleh presentase capaian sebesar 100%.

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 5 Sasaran 19
Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
5.	Opini BPK	WTP	N/A	WTP

Ket : N/A) : Realisasi tahun 2024 belum ada/belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua.

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Gambar 3.79
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-4
Kepada Pemerintah Kab. Biak Numfor Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023



- **Faktor yang mempengaruhi** keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator Opini BPK dengan realisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum opini WTP akan diberikan jika laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi, artinya opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Biak Numfor sudah mengalami peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilihat dari perbandingan hasil opini BPK tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, sehingga BPKAD Kabupaten Biak Numfor optimis dapat mencapai target WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 oleh BPK.

- **Adapun upaya/solusi** yang telah dilakukan untuk capaian indikator Opini WTP oleh BPK sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM pengelola keuangan dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - 2) Melakukan rekonsiliasi data keuangan secara berkala dengan instansi terkait;
 - 3) Melakukan inventarisasi dan penatausahaan aset tetap secara berkala;
 - 4) Menindaklanjuti rekomendasi BPK secara cepat dan tepat;

- 5) Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 6) Menyampaikan kepada seluruh SDM pengelola keuangan dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berkomitmen, konsisten dan bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparans dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator Opini BPK, sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - 3) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

Gambar 3.80
Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim Audit BPK RI



Gambar 3.81
Rapat Koordinasi dalam rangka Tindak Lanjut
atas Rekomendasi BPK RI



Gambar 3.82
Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah
melalui Aplikasi SIPD RI kepada ASN Pengelola Keuangan Daerah



- ✚ **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-19 (sembilan belas) yang dilaksanakan oleh DPMK (Indikator 1) dengan anggaran sebesar Rp. 5.484.087.406,- terealisasi sebesar Rp. 3.910.408.985,- (71,03%), Bagian Organisasi Setda (Indikator 2) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

terrealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (100%), BKPSDM (Indikator 3) dengan anggaran sebesar Rp. 6.144.525.677,- terrealisasi sebesar Rp. Rp.5.520.110.648,- (89,83%), Bagian Hukum Setda (Indikator 4) dengan anggaran sebesar Rp. 628.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 628.000.000,- (100%) dan BPKAD (Indikator 5) dengan anggaran sebesar Rp. 10.191.405.810,- terrealisasi sebesar Rp. 8.938.953.050,- (87,71%). Maka jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ke-19 (sembilan belas) adalah sebesar Rp. 22.648.018.893,- terrealisasi sebesar Rp. 19.197.472.683,- (84,76%). Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 84,76% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,58%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-19 (sembilan belas) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Target RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026
1.	Indeks Desa Membangun	0,5621	0,5709	0,5797	0,5885	0,5969	0,5969
2.	Nilai AKIP	51,10	52,05	54,27	62,68	69,43	76,9
3.	Indeks Merit Sistem	0,4	0,4	0,41	0,41	0,51	0,61
4.	Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	5	6	10	7	7	7
5.	Opini BPK	WTP	WTP	N/A	WTP	WTP	WTP

Ket : N/A) : Realisasi tahun 2024 belum ada/belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua.

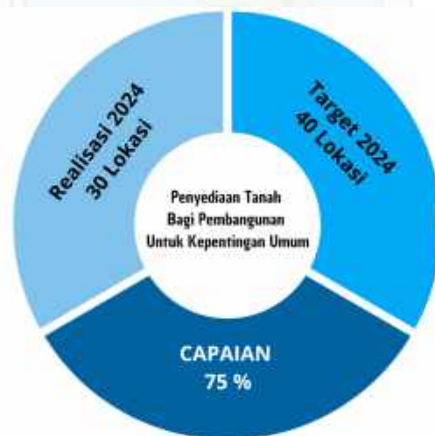
Sumber Data : DPMK, SETDA, BKPSDM, dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2024

SASARAN 20
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN TANAH UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ke-20 (dua puluh) dengan 1 (satu) indikator adalah 75% dengan predikat kinerja “Sedang”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	40 Lokasi	30 Lokasi	75

Penyediaan tanah pada tahun 2024 dilakukan melalui penyelesaian tanah yang diganti rugi sebanyak 30 bidang lokasi dari target ditetapkan dengan penyelesaian lokasi, sehingga capaian realisasi indikator kinerja penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan



umum tahun 2024 sebesar 30 lokasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 40 lokasi dengan presentase capaian sebesar 75%. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 terjadi penurunan realisasi tahun 2023 sebanyak 38 lokasi.

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20
Tahun 2024 dan 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
		2024	2023
Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	40 Lokasi	30 Lokasi	38 Lokasi

Sumber Data : DPKP Kab. Biak Numfor Tahun 2024

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan** dalam tidak tercapainya indikator kinerja penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai berikut :
 - 1) Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - 2) Rasionalisasi Anggaran yang mengakibatkan berkurangnya Layanan Penyelesaian Pengurusan Hak Atas Aset Tanah Pemda yang dapat ditangani.
- **Solusi/Upaya** yang dilakukan untuk mencapai indikator penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah sebagai berikut :
 - 1) Memperkuat penataan akses reform, koordinasi integrasi penataan aset dan akses reform dan sosialisasi regulasi/kebijakan pertanahan;
 - 2) Memprioritaskan anggaran sesuai dengan jenis belanja supaya efektif sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui DPKP telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam memenuhi target indikator penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan program pengelolaan tanah kosong.

Gambar 3.83

Penyelesaian Tanah Lokasi Pelabuhan Perintis Numfor



- **Efisiensi penggunaan sumber daya** dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-20 (dua puluh) yang dilaksanakan oleh DPKP dengan anggaran sebesar Rp. 6.217.262.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.223.987.000,- (19,68%). Dengan realisasi anggaran sebesar 19,68% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 75%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai target sasaran ke-20 (dua puluh) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi indikator kinerja per tahun terhadap target kinerja RPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.61
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Target RPD

Indikator Kinerja	Realisasi			Target RPD		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	21 Lokasi	38 Lokasi	30 Lokasi	40 Lokasi	45 Lokasi	50 Lokasi

Sumber Data : DPKP Kab. Biak Numfor Tahun 2024

A. REALISASI ANGGARAN

Kinerja sasaran yang dicapai selama tahun 2024 secara umum didukung oleh pelaksanaan program atau kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program atau kegiatan untuk pencapaian masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik. Dukungan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. **706.598.292.276,-** dengan angka realisasi sebesar Rp. **618.920.299.802,-** atau sebesar **88%**. Tingkat realisasi anggaran apabila dibandingkan tingkat capaian kinerja **82,74%**, menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

B. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan didasarkan pada capaian kinerja dan besaran anggaran yang terserap pada masing-masing sasaran. Anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila tingkat capaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran. Menghitung efisiensi anggaran menggunakan rumus yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-214/MK.02/2017, adalah :

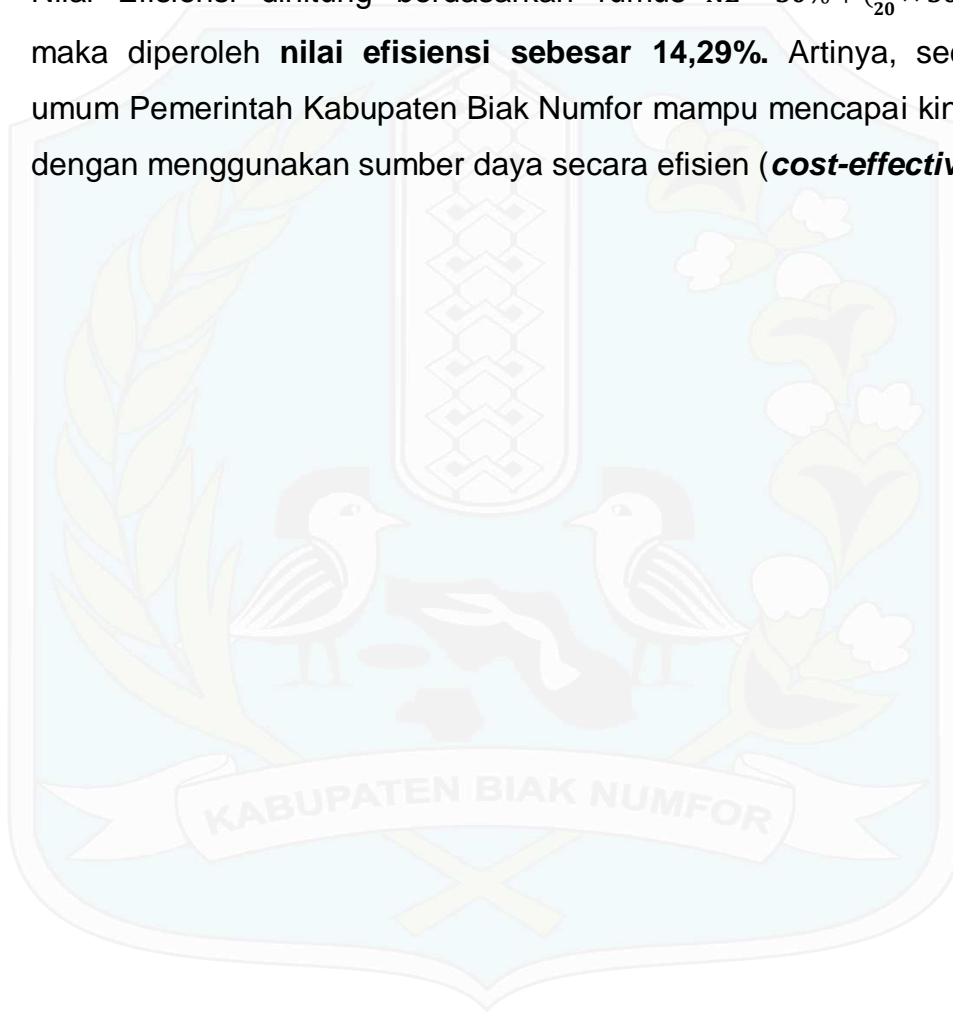
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, (PAK_i) merujuk pada pagu anggaran keluaran i , namun dalam penerapan yang dilakukan (PAK_i) merujuk pada pagu anggaran kinerja i . Begitu juga dengan (RAK_i) yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan (CK_i) yang merujuk pada capaian kinerja i . Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA (CKi)	ANGGARAN (Rp)		PAKi x CKi	(PAKi x CKi) – RAKi
			Pagu (PAKi)	Realisasi (RAKi)		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1,0237	258.508.948.704	219.765.185.841	264635610788	44870424947
2.	Pertumbuhan Ekonomi	0,7259	69.956.650.226	63.050.013.827	50781532399	-12268481428
3.	PDRB Perkapita					
4.	Indeks Infrastruktur Wilayah	1,01	72.645.681.092	66.165.817.627	73372137903	7206320276
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	0,6177	0	0	0	0
6.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	0,9878	5.105.000.000	5.105.000.000	5042719000	-62281000
7.	Harapan Lama Sekolah					
8.	Usia Harapan Hidup	1,0323	82.730.508.500	69.749.478.793	85402703925	15653225132
9.	Persentase Pemuda Terampil	0,7104	1.507.000.000	1.507.000.000	1070572800	-436427200
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
11.	Indeks Pembangunan Gender					
12.	Persentase Penduduk Miskin					
13.	Gini Rasio	1,1547	23.114.777.540	20.703.850.417	26690633625	5986783208
14.	Rasio Penduduk Ber KTP					
15.	Total Fertility Rate					
16.	Indeks Demokrasi					
17.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1,0502	15.667.697.468	15.334.287.161	16454215881	1119928720
18.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	0,4075	29.637.941.035,-	25.779.210.160	12077460972	-13701749188
19.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	0,92	10.565.994.000	10.565.994.000	9720714480	-845279520
20.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	0,7167	30.139.303.522	29.656.200.293	21600838834	-8055361459
21.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB					
22.	Laju Inflasi					
23.	Persentase Pertumbuhan UMKM	0,7086	53.174.332.482	48.857.537.927	37679331997	-11178205930
24.	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap					
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1,0054	219.427.000	219.427.000	220611906	1184906
26.	Cakupan Layanan Transportasi	0,8333	17.340.571.000	17.340.571.000	14449897814	-2890673186
27.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,8373	915.097.300	915.094.998	766210969	-148884029
28.	Indeks Resiko Bencana	1	6.504.081.514	3.784.171.075	6504081514	2719910439
29.	Indeks Desa Membangun	1,0558	22.648.018.893	19.197.472.683	23911778347	4714305664
30.	Nilai AKIP					
31.	Indeks Merit Sistem					

32.	Jumlah PERDA Yang Dihasilkan					
33.	Opini BPK					
34.	Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0,75	6.217.262.000	1.223.987.000	4662946500	3438959500
TOTAL			706.598.292.276	618.920.299.802	655043999654	36123699852
			88		5,51	

Dari data diatas, maka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebesar 5,51%. Dengan Nilai Efisiensi dihitung berdasarkan rumus $NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50\%)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar **14,29%**. Artinya, secara umum Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (**cost-effective**).





BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud berkembangnya akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah, Penyusunan Laporan ini merupakan langkah yang baik yang menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2024 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target dimana beberapa indikator kinerja masih perlu membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Akan tetapi, untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan “**Tinggi**”, karena capaian rata-rata seluruh sasaran strategis mencapai **82,74%** dari target. Hasil pengukuran pada 20 (dua puluh) Sasasaran Strategis Kabupaten Biak Numfor yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator dengan kategori **Sangat Tinggi**;
2. 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator dengan kategori **Tinggi**;
3. 5 (lima) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator dengan kategori **Sedang**;
4. 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator dengan kategori **Rendah**;
5. 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator dengan kategori **Sangat Rendah**; dan
6. 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator **tanpa realisasi atau data tidak tersedia** di tingkat Kabupaten melainkan data tersedia di tingkat Provinsi

Capaian kinerja diatas dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, untuk mengelola atau menjalankan program-program terkait keberhasilan dengan menggunakan anggaran sebesar **Rp. 706.598.292.276,-** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 618.920.299.802,-** atau **88%**. Dari sisi anggaran, realisasi anggaran yang ditetapkan untuk mengelola indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024 telah tercapai **88%** terdapat efisiensi sebesar **5,51%** atau dengan nilai efisiensi sebesar **14,29%**.

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan sistem informasi berbasis website dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dukungan instansi lain serta masyarakat semoga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan AKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan

mengalami peningkatan dan dapat mewujudkan transparansi yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 terdapat indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Biak Numfor.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua untuk mampu dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Biak Numfor

Biak, 19 Februari 2025



BUPATI BIAK NUMFOR

SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum.



LAMPIRAN



BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit 01 Biak, Telepon/Fax : 0981-21688 / 21524

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

Jabatan : Pj. BUPATI BIAK NUMFOR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Biak, 25 Maret 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,02 %
		2. PDRB Perkapita	Rp. 42.792.656
3.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Wilayah	2,60
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan Dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	55,01
5.	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,75 Tahun
		2. Harapan Lama Sekolah	14,32 Tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,7 Tahun
7.	Meningkatnya Partisipasi Dan Daya Saing Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan	1. Persentase Pemuda Terampil	61 %
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,1 %
		3. Indeks Pembangunan Gender	90,43
8.	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	1. Persentase Penduduk Miskin	24,06 %
		2. Gini Rasio	0,369
		3. Rasio Penduduk Ber KTP	79,79 %
		4. Total Fertility Rate	25 /1000 Perempuan
9.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Demokrasi	54,40
10.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	15,52 %
11.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Promosi Wisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	4 Hari
12.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dan Ekspansi Produksi Lokal	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,5 %
13.	Menguatnya Industri Dan Perdagangan Yang Berdaya Saing	1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4,33 %
		2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,33 %
		3. Laju Inflasi	1,52 %
		4. Persentase Pertumbuhan UMKM	20 %
14.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,52
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	60 %
17.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80%
18.	Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Sedang
19.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani	1. Indeks Desa Membangun	0,5885
		2. Nilai AKIP	62,68
		3. Indeks Merit Sistem	0,41
		4. Jumlah PERDA Yang Dihasilkan	7
		5. Opini BPK	WTP
20.	Meningkatnya Ketersediaan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	40 Lokasi



Biak, 25 Maret 2024
 Hj. BUPATI BIAK NUMFOR

[Handwritten Signature]
 SOFI BUNSAPIA, SH., M.Hum.



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50/188.4.5/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
1. Tim Koordinasi
Mengkoordinasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi yang bersangkutan, meliputi: Data Base dan batas waktu yang telah ditetapkan.
 2. Tim Penyusun
 - a. menyiapkan data dan informasi;
 - b. menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
 - c. menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Utama;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang akan dikirim kepada Gubernur Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Biak Numfor.
 3. Sekretariat
Melaksanakan kegiatan Tata Usaha, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 10 Februari 2025

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SAMSUNG, MM
No. 106/2005/02/2005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
5. DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Kepala Cabang Bank Papua Kabupaten Biak Numfor di Biak; dan
10. Yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50/188.4.5/ TAHUN 2025
TANGGAL 10 FEBRUARI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum	Pj. BUPATI BIAK NUMFOR	PENGARAH
2.	ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	KETUA
3.	ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIS
4.	ARNOLD RAMSES K. KBAREK, S.IP.	SEKRETARIS BAPPEDA	ANGGOTA
5.	AKBAR, S.STP.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6.	DJAMIATI, S.H.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
7.	RUTH JUBELINA AGUSTINA SANGGAINA MANPIOPER, S.T.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	ANGGOTA
8.	ADAM ABUBAKAR, S.E.	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANGGOTA
9.	MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.	KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA
10.	NURHIDAYAT, S.STP.	AUDITOR AHLI PERTAMA INSPEKTORAT	ANGGOTA
11.	MELKISEDEK NAP, S.IP.	PLT. KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	ANGGOTA
12.	GIDEON Y. APIEM, S.A.P.	STAF	ANGGOTA
13.	CARMEN, S.IP.	STAF	ANGGOTA
14.	JARIYAH	STAF	ANGGOTA
15.	MELINDA SUSANTI, A.Md.	STAF	ANGGOTA

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA





Jalan Majapahit No. 1 Biak, Kode Pos 98117
(0981) 21980, Fax : (0981) 21524